

**ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA DEFISIT ANGGARAN DOMESTIK
PEMERINTAH DENGAN TINGKAT INFLASI DI INDONESIA**

TAHUN 1986-2000

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Oleh

Terima Tgl : 04 MAR 2002

No. Induk : 0488

KLASIR / PENYALIN :

Klass

257 D
ABD
a

Dadang Ishak Abdullah

NIM, DIA195-110

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2001

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Hubungan Kausalitas antara Defisit Anggaran Domestik Pemerintah dengan Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 1986 - 2000.

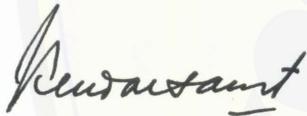
Nama Mahasiswa : Dadang Ishak Abdullah

NIM : 95 - 110

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

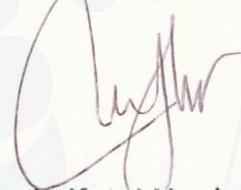
Konsentrasi : Ekonomi Keuangan dan Perbankan

Pembimbing I



Dra. Ken Darsawarti, MM
NIP. 130 531 975

Pembimbing II



Dra. Anifatul Hanim
NIP. 131 953 240

Ketua Jurusan



Dra. Aminah, MM.
NIP. 130 676 291

Tanggal Persetujuan : 10 November 2001

MOTTO

Barang siapa diuji lalu bersabar, diberi lalu bersyukur, dizhalimi lalu memaafkan, dan berbuat zhalim lalu beristighfar, maka bagi mereka keselamatan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah.

(HR. Al Baihaqi)

Sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat

(QS:Al-Mujaadilah:11)



JUDUL SKRIPSI

ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA DEFISIT ANGGARAN
DOMESTIK PEMERINTAH DENGAN TINGKAT INFLASI
DI INDONESIA TAHUN 1986 - 2000

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : DADANG ISHAK ABDULLAH

N. I. M. : D1A195110

Jurusan : ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

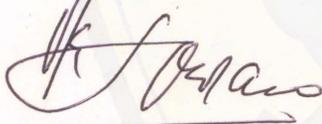
telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

24 NOPEMBER 2001

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

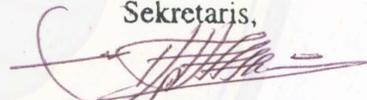
Ketua,



Drs. BAMBANG YUDONO, MM.

NIP. 130 355 409

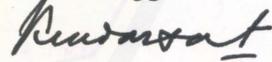
Sekretaris,



Drs. URIP MUHARSO

NIP. 131 120 333

Anggota,



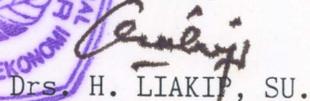
Dra. KEN DARSAWARTI, MM.

NIP. 130 531 975



Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi

Dekan,



Drs. H. LIAKIP, SU.

NIP. 130 531 976

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada yang tercinta :

- *Kedua Orang tuaku Bapak Sulaeman dan Ibu Faridah, atas limpahan kasih sayang dan do'a dalam setiap sujud-sujud yang tak pernah redup*
- *Kakakku-kakakku dan adikku yang selalu memberikan aku semangat dan dorongan*
- *Dean-ku yang selalu memperhatikan dan membantu-ku, kritik dan saran-mu akan selalu saya dengar !*
- *Almamaterku tercinta*

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul Analisis Hubungan Kausalitas Antara Inflasi dengan Defisit Anggaran Domestik Pemerintah Indonesia Tahun 1986 – 2000, yang bertujuan untuk mengetahui perilaku atau pola hubungan antara inflasi dan defisit anggaran domestik pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Dinamis Uji Kausalitas Granger (Granger Causality). Dalam penelitian ini data penelitian diperoleh melalui studi pustaka yaitu mengumpulkan data dengan mengutip dari instansi terkait yaitu Bank Indonesia dan Biro Pusat Statistik (BPS), adapun sampel penelitian ini sebanyak 15 tahun pengamatan mulai tahun 1986 – 2000.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif – analitis, artinya metode penelitian yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.

Data dalam penelitian ini data diolah dengan menggunakan alat analisa Uji Granger melalui Program TSP 7.0. Hasil penelitian dengan menggunakan uji kausalitas Granger menunjukkan adanya hubungan yang searah antara inflasi dan defisit anggaran domestik, hubungan searah tersebut yaitu dari inflasi mempengaruhi defisit anggaran domestik, sedangkan defisit anggaran domestik tidak mempengaruhi pada inflasi selama tahun penelitian. Pada kendala lag 4 dan lag 2 hasil regresi uji Granger dengan memasukkan variabel dependen defisit anggaran domestik dan inflasi sebagai variabel determinan atau variabel independen menunjukkan masing-masing dari nilai t_{hitung} koefisien variabel inflasi yang signifikan tidak sama dengan nol, atau $b_j \neq 0$, dan juga dengan melihat nilai R^2 (0,95 dan 0,74) serta F_{hitung} yang signifikan pada derajat kepercayaan 95 % maka dapat disimpulkan terdapat hubungan atau pengaruh dari inflasi terhadap defisit anggaran domestik.

Perhitungan pada lag 4 dan lag 2 dengan memasukkan variabel inflasi sebagai variabel dependen dan variabel defisit anggaran domestik pemerintah sebagai variabel independen menunjukkan masing-masing nilai t_{hitung} yang tidak signifikan sama dengan nol, atau $d_j = 0$, juga dengan melihat nilai R^2 yang kecil dan nilai F_{hitung} yang tidak signifikan pada derajat keyakinan 95 %, maka dapat disimpulkan tidak adanya pengaruh defisit anggaran domestik pemerintah terhadap inflasi selama tahun penelitian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang senantiasa memberikan berkat dan rahmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “Analisis Hubungan Defisit Anggaran Domestik Pemerintah Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 1986 - 2000” disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi – Universitas Jember. Skripsi ini membahas tentang perilaku hubungan antara Defisit anggaran domestik pemerintah dan inflasi selama kurun waktu 1986 – 2000.

Banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan petunjuk bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Tidak berlebihan kiranya, jika pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Dra. Ken Darsawarti, MM dan Dra. Anifatul Hanim, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk membantu dan membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Drs. Liakip, SU selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Direktur BI Cabang Jember beserta seluruh karyawannya yang telah membantu dalam penyediaan data.
4. Pimpinan BPS Cabang Jember beserta karyawan yang juga membantu dalam penyediaan informasi dan data-data penelitian.
5. Bapak Sulaeman dan Ibu Faridah yang telah memberi dorongan dan semangat dan do'a kepada penulis sehingga karya ini dapat terselesaikan.
6. Sahabatku, teman kost Sumber Alam No. 11, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

7. Teman-temanku juga di Nias No. 10 (Arik, Nuning, Ika, Bety) terima kasih untuk do'a-nya
8. Crew Disbun Computer (Bang. Syarif) terima kasih untuk bantuannya dalam terselesaikannya skripsi ini.
9. Pihak-pihak lain yang telah ikut serta membantu dalam terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini, terima kasih atas bantuannya.

Penulis menyadari bahwa karya ini belum sempurna, baik menyangkut aspek penulisan dan materi. Untuk itu tanggapan berupa kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Harapan penulis semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dan para pembaca semua. Amin

Jember, 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN ABSTRAKSI	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian sebelumnya	9
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1 Defisit Anggaran Domestik Pemerintah	10
2.2.2 Inflasi	15
2.2.3 Hubungan Defisit Anggaran Domestik Terhadap Inflasi	21
2.2.4 Hubungan Inflasi Terhadap Defisit Anggaran Domestik	24
2.3 Hipotesis	26

III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian	27
3.1.1 Jenis Penelitian	27
3.1.2 Unit Analisis.....	27
3.1.3 Prosedur Pengumpulan Data.....	27
3.2 Metode Analisis Data	27
3.3 Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran	29

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Variabel Pengamatan.....	31
4.1.1 Perkembangan Defisit Anggaran Domestik Pemerintah Indonesia.....	31
4.1.2 Perkembangan Inflasi di Indonesia	35
4.2 Analisis dan Pembahasan	38
4.2.1 Analisis Hubungan Kausalitas Inflasi dan Defisit Anggaran Domestik dengan Pendekatan Kausalitas Granger.....	38
4.2.2 Pembahasan	41

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA.....	49
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	52
-------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.	Realisasi Anggaran Pemerintah Indonesia Tahun Anggaran 1985/1986 – 1999/2000 (Milyar Rupiah).....	5
Tabel 2.	Realisasi Anggaran Penerimaan Negara Indonesia Tahun Anggaran 1985/1986 – 1999/2000.....	32
Tabel 3.	Realisasi Anggaran Pengeluaran Negara Indonesia Tahun Anggaran 1985/1986 – 1999/2000.....	33
Tabel 4.	Laju Inflasi Tahunan di Indonesia Berdasarkan Perubahan Indeks Harga Konsumen Tahun 1986 – 2000	36
Tabel 5.	Hasil Regresi Uji Granger : Inflasi Terhadap Defisit Anggaran Domestik	38
Tabel 6.	Hasil Regresi Uji Granger : Defisit Anggaran Domestik Terhadap Inflasi	40
Tabel 7.	Kriteria Hasil Pengujian Koefisien Regresi Antara Inflasi dan Defisit Anggaran Domestik.	41

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1.	Data Penelitian : Perkembangan Defisit Anggaran Domestik Pemerintah Indonesia Tahun 1986 – 2000.
Lampiran 2.	Data Penelitian : Perkembangan Inflasi di Indonesia Tahun 1986 – 2000.
Lampiran 3.	Hasil Analisis Uji Granger : Inflasi Terhadap Defisit Anggaran Domestik Pemerintah Indonesia Tahun 1986 – 2000 dengan Menggunakan Kendala/Lag 4.
Lampiran 4.	Hasil Analisis Uji Granger : Inflasi Terhadap Defisit Anggaran Domestik Pemerintah Indonesia Tahun 1986 – 2000 dengan Menggunakan Kendala/Lag 2.
Lampiran 5.	Hasil Analisis Uji Granger : Defisit Anggaran Domestik Pemerintah Indonesia Terhadap Inflasi Tahun 1986 – 2000 dengan Menggunakan Kendala/Lag 4.
Lampiran 6.	Hasil Analisis Uji Granger : Defisit Anggaran Domestik Pemerintah Indonesia Terhadap Inflasi Tahun 1986 – 2000 dengan Menggunakan Kendala/Lag 2.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara maju maupun negara berkembang seringkali menghadapi permasalahan yang sangat rumit terutama dalam memelihara kestabilan dan laju pertumbuhan ekonomi. Tingkat kestabilan ekonomi yang dimaksud meliputi kestabilan harga, perkembangan tingkat pendapatan, tingkat pertumbuhan kesempatan kerja serta dalam kaitannya dengan laju pertumbuhan jumlah uang beredar. Dalam upaya memelihara tingkat kestabilan ekonomi tersebut, maka peranan pemerintah dalam menentukan berbagai kebijakan adalah sangat penting, terutama dalam menentukan kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal (Wijaya, 1992:3).

Inflasi bersama-sama tingkat pengangguran dan ketidakseimbangan neraca pembayaran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia. Pada masa sebelum pemerintahan orde baru (antara 1960 –1965), Indonesia mengalami hyperinflation dimana laju inflasi mencapai 650%. Untuk mengatasi keadaan ini pemerintah melancarkan program rehabilitasi dan stabilitasi yang sasaran utamanya mengendalikan inflasi melalui penetapan suku bunga tinggi. Kebijakan suku bunga tersebut di gantikan dengan penetapan pagu kredit pada tahun 1974 (Iswardono, 1991:127). Deregulasi 1 juni 1983 mengakibatkan perubahan mekanisme piranti pengendalian moneter yang sebelumnya di tempuh melalui penetapan pagu kredit menjadi pengaturan jumlah uang primer. Dilihat dari sudut moneterist, pengendalian inflasi identik dengan pengurangan jumlah uang beredar yang ada ditangan masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan 20 januari 1990. Inti kebijakan tersebut di samping menyehatkan struktur moneter juga mempunyai sasaran pengendalian laju inflasi. Secara rinci

kebijakan itu berupa keputusan untuk meniadakan kredit likuiditas pada bank-bank umum, dengan cara ini maka akan memperkecil kucuran kredit dari bank ke tangan masyarakat sehingga jumlah uang beredar dapat dikendalikan, demikian pula inflasi (Uphadi,1997:3).

Secara makro, perkembangan ekonomi yang membaik pada salah satu bidang/sector tertentu harus ditempatkan pada konteks perekonomian secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi tinggi misalnya, tanpa memperhatikan masalah pemerataan dan perluasan kesempatan kerja bukanlah perkembangan yang baik dari sudut pandang makro. Peningkatan ekspor dan pendapatan tanpa melihat laju inflasi yang tinggi, juga bukan perkembangan yang baik dari sudut pandang makro. Jadi arah kemakmuran semua pihak melibatkan lebih dari satu indikator ekonomi sebagai pegangan kajian (Widodo, 1999:12).

Pemerintah Orde Baru semasa berkuasa selalu berusaha meyakinkan bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Tetapi, ketika krisis terjadi ternyata Indonesia tidak mampu menghadapi *external shock* dan tidak dapat segera keluar dari krisis tersebut. Hal ini menunjukkan lemahnya perekonomian Indonesia, karena tidak didukung oleh kekuatan fundamental yang memadai. Fundamental ekonomi nasional yang merupakan salah satu penyebab krisis di Indonesia adalah fundamental makro. Ada beberapa *basic indicators* yang merupakan pondasi terpenting bagi perekonomian makro, antara lain Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, jumlah uang beredar di masyarakat (M1) atau likuiditas perekonomian (M2 atau M1 ditambah uang kuasi), investasi, cadangan devisa dan tingkat suku bunga. Beberapa variabel-variabel tersebut menggambarkan perkembangan sektor riil dan variabel-variabel lainnya mencerminkan perkembangan sektor moneter di dalam suatu ekonomi (Tambunan, 1998:50).

Tingkat represi yang begitu tinggi terhadap bidang moneter, yang tidak diimbangi disiplin pengelolaan di sektor lain, menimbulkan kerawanan timpangnya perkembangan sektor moneter dan sektor riil..

Penerapan uang ketat yang rencananya untuk penyesuaian kurs rupiah, malah menyebabkan dunia usaha menjadi lesu dan harapan meningkatnya ekspor tidak tercapai. Padahal melemahnya rupiah merupakan salah satu peluang bagi dunia usaha untuk menggenjot nilai ekspor (Abimanyu, 2000:13).

Investasi, khususnya investasi langsung (jangka panjang) sangat penting sebagai salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi. Didalam model pertumbuhan ekonomi, tabungan dalam negeri merupakan satu-satunya sumber pembiayaan kebutuhan investasi. Tetapi di negara sedang berkembang khususnya dari golongan negara miskin, sumber tersebut terbatas. Oleh karena itu negara-negara sedang berkembang tergantung pada modal asing, baik dalam bentuk pinjaman, bantuan atau investasi langsung (PMA). Masalah yang sama juga dihadapi oleh Indonesia, karena tabungan nasional pada saat itu sangat kecil atau praktis tidak ada, sedangkan kebutuhan dana untuk investasi sangat besar untuk membiayai proses pembangunan ekonomi (Tambunan, 1998:92).

Perkembangan ekonomi Indonesia telah berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan setelah lebih dari setahun, sejak awal 1997 diguncang krisis ekonomi dan krisis kepercayaan kepada pemerintah. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 15 % sampai 12 %, inflasi mencapai 85 % sampai 90 % pada tahun 1998. Jumlah keluarga miskin naik dari 9 % ke 30 %, biaya hidup naik antara 3 sampai 4 kali lipat. Sementara setiap penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 % akan menghasilkan PHK setidaknya sebesar 400.000 orang. Dengan kurs rupiah pada tingkat terendah, subsidi pangan (dari impor beras, kedelai, bungkil dan tepung terigu) diperkirakan akan menguras belanja pemerintah lebih dari Rp.14 Trilyun dengan asumsi US\$ = Rp.10 000. Subsidi bahan bakar minyak juga akan tinggi, minimal Rp.20 Trilyun (Abimanyu, 2000:5).

Utang pemerintah (*public debt*), atau bisa disebut juga penerimaan pembangunan Indonesia, menurut Bank Dunia pada tahun 1999

meningkat tajam selama periode krisis. Kalau pada bulan Juni 1997 utang pemerintah besarnya 24 % dari GDP, pada akhir 1998 mencapai 60 % sedangkan pada akhir tahun 1999 mencapai 102 %. Perkembangan penerimaan pembangunan (bantuan/utang luar negeri) dapat dilihat pada (tabel 1). Peningkatan utang sebagai persentase dari GDP disebabkan oleh depresiasi rupiah dan pengaruh inflasi terhadap GDP (16 %), peningkatan pinjaman luar negeri (11 %) dan sekitar 52 % berasal dari obligasi dalam negeri, yang diantaranya untuk program rekapitalisasi dan penyehatan perbankan. Untuk kembali ke keadaan utang sebelum krisis (24 % dari GDP) diperlukan waktu sedikitnya 15 tahun. Meningkatnya utang tersebut dikatakan karena: (1) untuk membiayai defisit anggaran belanja yang bertujuan memberikan *fiskal stimulus* kepada ekonomi, sebagai upaya mengurangi tekanan pada inflasi, dan (2) untuk mencegah kehancuran sistem perbankan nasional, dengan melakukan injeksi modal melalui *government bonds* dan obligasi (Abimanyu, 2000:115).

Upaya pemerintah untuk meningkatkannya (khususnya penerimaan dalam negeri) dari berbagai jenis pajak tertentu sangat terbatas. Demikian juga dengan upaya untuk meningkatkan penerimaan non pajak termasuk bagian laba BUMN. Penerimaan dari hasil penjualan aset BUMN kepada pemodal asing juga tidak dapat menutup APBN dan melunasi utang luar negeri. Privatisasi BUMN merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi alokasi faktor-faktor produksi guna meningkatkan efisiensi perekonomian nasional. Privatisasi BUMN adalah untuk meningkatkan penerimaan pemerintah guna membiayai defisit anggaran belanjanya dan memenuhi kewajiban pembayaran hutang luar negeri (Widodo, 2000:190).

Tabel 1.
Realisasi Anggaran Pemerintah Indonesia
Tahun Anggaran 1985/1986-1999/2000 (Milyar Rupiah).

Tahun	Penerimaan Dalam Negeri	Pengeluaran Rutin	Penerimaan Pembangunan	Pengeluaran Pembangunan
1986	20 939	12 007	2 829	11 740
1987	17 385	13 717	5 513	9 091
1988	21 731	17 340	5 556	9 770
1989	23 414	20 935	10 124	12 317
1990	31 504	24 335	8 330	15 394
1991	42 193	29 121	8 382	18 251
1992	42 582	29 053	9 975	23 075
1993	48 863	33 605	11 098	26 906
1994	56 113	40 290	10 753	28 428
1995	66 418	44 069	9 838	30 692
1996	73 014	50 435	9 009	28 781
1997	87 630	62 561	11 900	35 952
1998	11 275	89 610	23 817	38 359
1999	158 905	147 717	56 225	67 869
2000	201 693	166 881	43 633	78 311

Sumber: Nota Keuangan dan APBN, BPS Tahun 1986-2000

Banyak faktor yang mempengaruhi besarnya laju inflasi, baik variabel ekonomi moneter maupun variabel ekonomi non moneter. Terlebih lagi dengan masuknya unsur luar negeri kedalam analisis inflasi perekonomian yang bersifat terbuka. Cukup banyak penelitian para ahli tentang inflasi yang menonjolkan variabel ekonomi moneter, khususnya jumlah uang beredar, sebagai faktor utama terjadinya inflasi baik di negara maju maupun negara berkembang. Dilain pihak ada juga ahli ekonomi yang menganggap bahwa inflasi di negara bekembang terutama disebabkan oleh variabel non moneter, seperti struktur perekonomian ataupun pengaruh defisit anggaran.

Salah Satu pemicu laju inflasi di Indonesia adalah faktor defisit anggaran domestik pemerintah. Defisit anggaran domestik pemerintah terjadi karena peningkatan pengeluaran pemerintah yang cepat, namun

kurang didukung oleh penerimaan dalam negeri yang cukup memadai. Defisit anggaran domestik pemerintah diidentifikasi sebagai penyebab utama inflasi, karena defisit anggaran domestik pemerintah yang dibiayai pinjaman luar negeri, dapat menyebabkan bertambahnya jumlah uang beredar melalui penambahan uang primer (Prasetiantono, 1995:145).

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi sumber inflasi mendorong penerapan konsep anggaran berimbang (*balanced budget*) sebagai kebijakan untuk menciptakan kesetabilan pada awal orde baru. Pelaksanaan "*konsep anggaran berimbang*" bertujuan menciptakan disiplin APBN untuk tidak menjadi pendorong inflasi. Pengertian anggaran berimbang dalam konteks negara adalah anggaran pemerintah yang mencerminkan keserasian antara penerimaan dan pengeluaran, dimana defisit anggaran ditutup bukan dengan mencetak uang baru, melainkan dengan pinjaman luar negeri (Arsjad, 1992:45).

Berdasarkan konsep tersebut diatas, sebenarnya anggaran belanja pemerintah Indonesia tidak pernah seimbang. Posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebenarnya berfluktuasi dari tahun ke tahun sesuai dengan pengaruh keadaan ekonomi, tetapi pemerintah selalu menyesuaikan penerimaan dengan pengeluarannya, sehingga tercapai anggaran belanja yang secara nominal berimbang. Secara ekonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia termasuk anggaran Defisit (Djamin, 1993:64).

Defisit anggaran domestik pemerintah mencerminkan pembiayaan pengeluaran domestik dengan menggunakan penerimaan luar negeri sehingga terjadi peningkatan jumlah uang primer, peningkatan jumlah uang primer inilah yang menyebabkan ekspansi jumlah uang beredar, dan karena tidak diikuti oleh peningkatan permintaan yang sebanding, menyebabkan terjadinya disequilibrium di pasar uang. Disequilibrium ini tercermin juga di pasar barang dalam bentuk naiknya tingkat harga sehingga terjadi inflasi (Gunawan, 1991:169).

Hubungan defisit anggaran domestik pemerintah dengan inflasi terjadi interaksi dua arah. Defisit anggaran yang besar dapat mendorong laju inflasi yang cepat, sehingga menyebabkan pemerintah melakukan pencetakan uang untuk membiayai defisit. Laju inflasi yang tinggi akan meningkatkan defisit anggaran dengan berkurangnya nilai riil dari penerimaan pajak (Dornbusch dan Fischer, 1997:245).

1.2 Perumusan Masalah

Kondisi perekonomian Indonesia sebagaimana diuraikan diatas, masih banyak mengalami permasalahan dalam proses perkembangannya. Tingginya defisit anggaran domestik pemerintah dan tingkat inflasi masih menjadi persoalan serius yang perlu penanganan secara cermat dan hati-hati oleh pemerintah dengan kebijakan ekonomi makronya. Defisit anggaran domestik pemerintah yang mencerminkan pengeluaran domestik dengan menggunakan penerimaan luar negeri terutama dalam bentuk pinjaman luar negeri, sehingga terjadi peningkatan jumlah uang primer, peningkatan jumlah uang primer inilah yang menyebabkan ekspansi jumlah uang beredar.

Inflasi timbul karena dalam sektor riil ada kelebihan permintaan barang terhadap penawarannya (*excess demand for goods*). Keadaan tersebut pada sektor moneter tercermin pada adanya kelebihan uang beredar atau kelebihan penawaran uang atas permintaan. Kedua proses tadi menghasilkan keadaan yang dicerminkan dalam naiknya harga barang atau turunnya harga (nilai) uang. Melihat kenyataan tersebut, Permasalahannya adalah: Bagaimanakah arah hubungan kausalitas antara defisit anggaran domestik pemerintah dengan tingkat inflasi pada perekonomian Indonesia tahun 1986-2000 ?.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

Mengetahui arah hubungan kausalitas antara defisit anggaran domestik pemerintah terhadap tingkat inflasi pada perekonomian Indonesia tahun 1986-2000.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. memberikan wacana makro tentang hubungan sebab akibat antara defisit anggaran domestik pemerintah terhadap tingkat inflasi pada perekonomian Indonesia tahun 1986-2000;
2. sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang berkaitan dengan masalah defisit anggaran domestik pemerintah dan inflasi

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang pengaruh defisit anggaran domestik pemerintah terhadap tingkat inflasi pernah dilakukan oleh Gunawan (1991). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa perkembangan defisit anggaran domestik pemerintah selama periode 1969-1982 ternyata sangat pesat sekali, dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 48,9 % (dari Rp 34 milyar menjadi Rp 6 trilyun); dimana laju pertumbuhannya terus meningkat dari Pelita I sampai Pelita III. Peningkatan yang sangat pesat ini terutama bersumber pada sangat lemahnya komponen domestik dalam penerimaan pemerintah disertai oleh peningkatan pengeluaran domestik yang cepat, sementara sumber-sumber luar negerinya meningkat cukup cepat. Peningkatan defisit anggaran domestik inilah yang paling mempengaruhi naiknya tingkat harga umum (53,6 % menurut hasil regresi dan 59 % menurut perhitungan beta coefficient). Ini diperkuat juga oleh besarnya koefisien korelasi antara defisit domestik anggaran pemerintah dengan tingkat harga umum (0,942). Pengaruh defisit anggaran domestik pemerintah terhadap tingkat harga umum tersalurkan melalui variabel antara jumlah uang beredar; terlihat dari besarnya koefisien korelasi antara keduanya (0,9846).

Pengaruh defisit anggaran domestik pemerintah terhadap inflasi di Indonesia pernah juga diteliti oleh Manurung (1999). Penelitian tersebut menggunakan metode analisis regresi linier sederhana, dengan data penelitian dari Tahun 1982-1997. Berdasarkan metode analisis regresi tersebut diperoleh hasil regresi:

$$GDDP = 74.2094 + 0,0056 GDDB + et$$

$$R^2 = 0,5974$$

Hasil persamaan tersebut diatas dapat dilihat bahwa koefisien Faktor defisit anggaran domestik pemerintah (GDDB) adalah sebesar 0,0056 yang menunjukkan hubungan yang positif dengan tingkat harga umum domestik (GDPD). Hal ini berarti apabila defisit anggaran domestik pemerintah meningkat maka harga umum domestik meningkat. Nilai konstanta sebesar 74.2094 menunjukkan bahwa tanpa adanya defisit anggaran domestik pemerintah, nilai indeks keseimbangan harga umum (inflasi) adalah 74.2094 per tahun. Koefisien regresi sebesar 0,0056 yang dihasilkan oleh pengaruh defisit anggaran domestik pemerintah terhadap tingkat inflasi menunjukkan bahwa setiap kenaikan defisit anggaran domestik pemerintah sebesar satu satuan akan menaikkan inflasi sebesar 0,0056 satuan per tahun. R squared (R^2) sebesar 59% menerangkan bahwa defisit anggaran domestik pemerintah mempengaruhi inflasi sebesar 59%, sedangkan 41% dipengaruhi faktor lain.

Siswanti (1999) melakukan penelitian mengenai pengaruh defisit anggaran domestik pemerintah dan tingkat harga internasional terhadap tingkat inflasi di Indonesia Tahun 1983-1997, dengan memakai metode analisis Error Correction Model (ECM). Berdasarkan pada pembentukan model koreksi kesalahan (ECM) menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel defisit anggaran domestik pemerintah dan tingkat harga internasional tidak dapat menjelaskan variasi tingkat inflasi di Indonesia. Namun dalam jangka panjang semua variabel bebas mampu menjelaskan variasi tingkat inflasi di Indonesia. Nilai F hitung signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 5% yang menunjukkan secara bersama-sama variabel bebas tersebut berpengaruh nyata terhadap tingkat inflasi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Defisit Anggaran Domestik Pemerintah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering disebut secara singkat anggaran (budget) pada hakekatnya merupakan rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun yang dituangkan

dalam angka-angka rupiah. Dalam anggaran negara, pemerintah merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan, menghitungnya dalam angka-angka rupiah kemudian pada sisi penerimaan direncanakan apa dan berapa yang akan diterima untuk membiayai pengeluaran tersebut (Arsjad, 1992:42).

Sisi pengeluaran dalam anggaran negara dikenal adanya pengeluaran rutin misalnya belanja pegawai, belanja barang, pembayaran cicilan bunga dan hutang, dan pengeluaran pembangunan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis pembiayaannya, yaitu alokasi anggaran pembangunan untuk berbagai departemen/lembaga negara, alokasi anggaran pembangunan daerah dan alokasi anggaran pembangunan lainnya. Alokasi pengeluaran pembangunan tersebut contohnya: biaya pelaksanaan proyek-proyek pemerintah untuk meningkatkan hasil pertanian, sarana perhubungan dan lain sebagainya. Pada sisi penerimaan dalam anggaran, kita dapat melihat sumber-sumber penerimaan apa saja yang diharapkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluarannya tadi. Maka kita akan mengenal penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari luar negeri yang disebut penerimaan pembangunan.

Penerimaan dalam negeri terutama berasal dari pajak, baik pajak dari minyak dan gas bumi maupun non minyak dan gas bumi. Perbedaan yang terakhir ini pada prinsipnya untuk mengetahui seberapa jauh ketergantungan penerimaan negara dari minyak dan gas bumi. Penerimaan pembangunan adalah pinjaman dari luar negeri yang bersyarat lunak sehingga disebut juga bantuan luar negeri. Penerimaan pembangunan dalam anggaran negara ditujukan untuk menutup kekurangan penerimaan yang lebih kecil dari seluruh pengeluaran, agar secara akuntansi anggaran tadi menjadi seimbang. Walaupun secara akuntansi anggaran belanja Indonesia selalu berimbang, tetapi secara ekonomis sebenarnya defisit. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa pengeluaran pemerintah (G), lebih besar dari pajak (T) dalam keseimbangan pendapatan.

Pertimbangan pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran pada suatu tahun anggaran melalui pinjaman luar negeri adalah karena bahayanya tidak sebesar bila defisit anggaran diatasi melalui pinjaman bank sentral. Bahaya yang dimaksud disini dapat diuraikan sebagai berikut: bila defisit diatasi pemerintah melalui pinjaman Bank Sentral, ini berarti Bank Sentral akan mencetak uang, akibatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan bertambah. Bila kebutuhan dalam negeri terutama supply kebutuhan pokok masyarakat tidak dapat mengimbangi bertambahnya jumlah uang beredar, maka dengan cepat harga-harga akan meningkat. Pinjaman luar negeri membawa konsekuensi bagi pemerintah untuk mengembalikannya disertai bunga kepada negara yang memberikan pinjaman (negara donor). Dengan adanya beban hutang tersebut pemerintah senantiasa harus mengawasi penggunaan dana bantuan luar negeri tersebut bagii proyek-proyek yang benar-benar bermanfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat, serta menjaga tersedianya kebutuhan pokok masyarakat seimbang dengan demand masyarakat yang meningkat sebagai akibat kegiatan pembangunan yang meningkat(Djamin, 1993:62).

Pemerintah pada umumnya melaksanakan surplus atau defisit dalam anggarannya. Surplus terjadi apabila seluruh penerimaan melebihi pengeluaran pemerintah. Defisit terjadi apabila pengeluaran melebihi penerimaan pajak. Apabila penerimaan dan pengeluaran-pengeluarannya sama besarnya, maka anggaran pemerintah adalah berimbang (Samuelson dan Nordhaus, 1985:457).

Pembiayaan defisit anggaran bisa melalui dua cara yaitu: *Pertama*, Departemen Keuangan membiayai defisitnya dengan meminjam dari sektor swasta (pembiayaan lewat hutang). Dalam hal ini, Departemen Keuangan menjual obligasi pemerintah kepada masyarakat baik individu maupun perusahaan. *Kedua*, Departemen Keuangan meminjam dari Bank Sentral untuk membiayai defisitnya, lembaga tersebut ikut serta dalam pembiayaan lewat penciptaan uang. Pembiayaan penciptaan ini, Bank

Sentral membeli sebagian utang/obligasi Departemen Keuangan (Dornbusch dan Stanley Fischer, 1997:534).

Terdapat perbedaan pokok antara pinjaman Departemen keuangan dari masyarakat dan pinjamannya dari Bank Sentral. Apabila Bank Sentral membeli utang Departemen Keuangan, Bank Sentral akan memberikan cek kepada Departemen Keuangan yaitu melalui penciptaan uang primer. Selanjutnya Departemen Keuangan menggunakan dananya tersebut, maka jumlah uang primer yang dimiliki masyarakat akan meningkat. Sebaliknya, apabila Departemen Keuangan meminjam dari masyarakat, kemudian membelanjakan dana masyarakat tersebut maka jumlah uang primer yang ada pada masyarakat tidak berubah kecuali untuk masa transisi yang singkat antara penjualan surat-surat berharga dan pengeluaran oleh Departemen Keuangan. Karena stok uang primer merupakan variabel makro ekonomi yang penting, maka perbedaan antara menjual hutang kepada masyarakat ataupun kepada Bank Sentral adalah penting sekali.

Defisit anggaran pemerintah terjadi apabila (Boediono, 1982:113):

- a. seluruh pengeluaran pemerintah tidak bisa dibiayai oleh sumber keuangan negara yang paling utama, yaitu pajak;
- b. penerimaan pajak plus pinjaman pemerintah dari masyarakat dalam negeri tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah;
- c. penerimaan pemerintah yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri tidak mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran.

Defisit anggaran (*Budget Deficit*) adalah selisih antara pengeluaran pemerintah dan pembayaran transfer dengan penerimaan terutama pajak. secara formula dapat dirumuskan sebagai berikut (Nopirin, 1993:96) :

$$\text{Def} = G - tY + R$$

dimana :

Def = defisit anggaran pemerintah

konsep anggaran berimbang yang digunakan pemerintah Indonesia maka guna meniadakan atau mengurangi defisit anggaran domestik, perlu diambil kebijaksanaan yang mengarah kepada peningkatan penerimaan domestik untuk mengimbangi pengeluaran domestik, serta mengurangi pengeluaran domestik pemerintah yang kurang perlu (Gunawan,1991:168).

2.2.2 Inflasi

Inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan (A.P Lerner dalam Gunawan,1991:168). Kelebihan permintaan akan barang-barang dapat diartikan sebagai berlebihnya tingkat pengeluaran (*level of spending*) untuk komoditi akhir dibandingkan dengan tingkat output maksimum yang dapat dicapai dalam jangka panjang, dengan sumber-sumber produksi tertentu. Tingkat output maksimum dalam jangka panjang disebut sebagai potensial riil GNP, sedangkan dalam jangka pendek diartikan sebagai *capacity riil GNP*. Menurut definisi diatas hal yang utama yang berkaitan dengan inflasi, yaitu:

1. pengeluaran yang diharapkan terlalu banyak bila dibandingkan dengan barang yang tersedia;
2. barang yang tersedia terlalu sedikit bila dibandingkan dengan tingkat pengeluaran yang diharapkan.

Definisi lainnya dikemukakan oleh F.W. Paish yang mengatakan: "pendapatan nominal meningkat jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan peningkatan arus barang dan jasa yang dibeli (pendapatan nasional riil)".

Kedua definisi diatas dapat dibedakan dalam dua hal: *Pertama*, bahwa Paish dalam definisinya mengemukakan variabel pendapatan uang agregat yang dibandingkan dengan GNP potensial riil, sedangkan Lerner menekankan pada pengeluaran agregat yang dibandingkan GNP

potensial riil. *Kedua*, Paish menekankan pada peningkatan variabelnya, sedangkan Lerner menekankan pada besaran variabelnya.

Terdapat beberapa indikator yang biasanya digunakan oleh ahli-ahli ekonomi untuk menggambarkan terjadinya inflasi di suatu negara; diantaranya adalah Indeks Biaya Hidup (IBH), Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Implisit Produk Domestik Bruto (GDP deflator), atau Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Masing-masing ukuran mempunyai kelebihan dan kelemahan, serta sangat tergantung pada tujuan pemakaiannya. Dari berbagai indeks harga diatas nampaknya IHK yang relatif memungkinkan digunakan sebagai indikator inflasi di Indonesia. IHK bisa digunakan karena faktor tersedianya data dan terutama karena digunakannya IHK sebagai indikator secara resmi oleh pemerintah.

Indeks Harga Konsumen (IHK) dimaksudkan sebagai pengukur perkembangan daya beli mata uang yang dibelanjakan oleh setiap rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Pengelompokan barang dan jasa didalam perhitungan IHK di Indonesia terdiri dari 200-225 jenis yang dibagi dalam kelompok makanan, perumahan, sandang dan aneka barang dan jasa (Gunawan, 1991:36).

Teori makro ekonomi standar menyebutkan bahwa ada dua tipe inflasi secara ekstrem, yaitu *demand pull inflation*. Dari sisi demand, inflasi disebabkan oleh meningkatnya permintaan agregat yang tidak dapat diimbangi oleh penawaran agregat pada suatu waktu tertentu. Dari dalam permintaan agregat sendiri ada peranan uang beredar yang meng-*induce* permintaan agregat. Akibat dari inflasi tipe ini adalah, tingkat output lebih besar daripada tingkat *output full employment*, dan tenaga kerja banyak terserap kedalam kegiatan ekonomi.

Tipe inflasi kedua disebabkan oleh ketidakmampuan sektor produksi karena meningkatnya biaya input dan adanya *mark up pricing*. Akibatnya, dengan tingkat permintaan yang tetap, supply berkurang, sehingga terjadi inflasi. Ekuilibrium berada dibawah tingkat *full employment* dan terjadi pengangguran (Abimanyu, 1998:127).

Defisit anggaran domestik pemerintah mencerminkan pembiayaan pengeluaran domestik dengan menggunakan penerimaan luar negeri, sehingga terjadi peningkatan jumlah uang primer. Peningkatan jumlah uang primer inilah yang menyebabkan ekspansi jumlah uang beredar, dan karena tidak disertai oleh peningkatan permintaan akan uang yang sebanding, menyebabkan terjadinya disequilibrium di pasar uang. Disequilibrium ini tercermin juga di pasar barang dalam bentuk naiknya tingkat harga sehingga terjadi inflasi. Melihat kenyataan tersebut, defisit anggaran domestik pemerintah merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menyebabkan inflasi (Gunawan, 1991:169).

Berbicara tentang cara untuk mengatasi inflasi tidak akan bisa terlepas dari penelaahan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi. Tanpa tahu dengan pasti penyebabnya akan dapat menyebabkan kesalahan atau kurang-efektifan kebijaksanaan yang dilakukan untuk mengatasi inflasi. Ada banyak pendapat ahli ekonomi tentang kebijaksanaan yang tepat untuk mengatasi inflasi, tetapi semuanya itu dapat dikelompokkan kedalam dua aliran pendapat yang bertentangan dalam banyak hal, yaitu dikenal dengan golongan Moneteris dan golongan Strukturalis.

Perbedaan pendapat itu pada dasarnya merupakan perbedaan cara melihat pembangunan ekonomi sehingga mempengaruhi pandangan tentang perubahan sosial, pemahaman kegiatan ekonomi dan sasaran kebijaksanaan ekonomi. D.Felix (dalam Gunawan, 1991:23) lebih spesifik lagi melihat perbedaan pendapat tersebut dalam tiga hal, yaitu dalam hal penyebab inflasi, efektifitas dan program stabilisasi, dan kebijaksanaan pembangunan yang sesuai. Lebih lanjut dia berpendapat bahwa dalam spektrum politik, golongan Strukturalis dapat dianggap "golongan kiri", sedangkan golongan Moneteris dianggap sebagai "golongan kanan".

Golongan Moneteris berpendapat bahwa inflasi sepenuhnya merupakan gejala moneter dan kontrolnya adalah melalui pengawasan atas jumlah uang beredar, supaya laju pertumbuhannya selalu konsisten

terjadi bersamaan dengan terjadinya peralihan negara berkembang dari perekonomian yang berorientasi ekspor menjadi perekonomian yang berorientasi substitusi impor (*Import Substitution Industry*). Padahal untuk transisi ini diperlukan perubahan struktur sosial-ekonomi yang mungkin dapat dicapai oleh mekanisme harga dalam kondisi pasar tidak sempurna serta mobilitas sumber-sumber yang demikian terbatas. Akibat dari usaha perubahan struktur yang drastis ini, terjadi “*shortages*” dan ketidakseimbangan di banyak sektor. Oleh karena itu, analisis golongan Strukturalis lebih banyak tertuju pada hambatan struktural yang menimbulkan inflasi, seperti yang dikemukakan Osvaldo Sunkel (dalam Gunawan, 1991:26) yaitu tidak elastisnya penawaran bahan makanan, *bottleneck* dalam penerimaan devisa dan hambatan finansial.

Mengenai hambatan struktural yang pertama, yaitu tidak elastisnya penawaran bahan makanan, disebabkan oleh cukup besarnya peran faktor musim atau cuaca, disamping masih tradisionalnya proses produksi bahan makanan serta rendahnya produktivitas petani dan tanah. Faktor urbanisasi yang cepat, yang disatu pihak menyebabkan tenaga penghasil bahan makanan berkurang, dan dilain pihak, dengan meningkatnya pendapatan mereka akan menyebabkan meningkat cepatnya permintaan akan bahan makanan, padahal penawaran tidak dapat mencukupinya (*inelastis*). Ini akan berakibat pada kenaikan harga bahan makanan. Bulmer-Thomas (dalam Gunawan, 1991:27) menanggapi pendapat iri dengan mengatakan, bahwa bila penawaran bahan makanan *inelastis*, dapat dilakukan cara untuk menutupi kekurangan bahan makanan dengan mengimpornya dari luar negeri guna mencegah tekanan kelebihan permintaan terhadap harga. Tetapi perlu diingat bahwa, sebagaimana layaknya negara berkembang dihadapkan pada masalah lain yang membatasi impor, yaitu ketiadaan atau kekurangan devisa untuk mengimpor barang dari luar negeri; ada *bottleneck* dalam penerimaan devisa.

Bottleneck dalam penerimaan devisa itu timbul akibat meningkat pesatnya permintaan impor yang tercermin dalam program pembangunan ekonomi berencana, mobilitas faktor produksi yang tidak sempurna, dan tidak cukup cepatnya peningkatan penerimaan devisa, sehingga mendorong kecenderungan terjadinya defisit dalam neraca perdagangan. *Foreign exchange constraint* ini, dilain pihak menyebabkan kecenderungan bagi pemerintah negara berkembang untuk menganut kebijaksanaan pengaturan impor yang ketat, sehingga menyebabkan timbulnya *shortages* barang-barang yang tadinya diimpor; berarti harga relatif barang-barang impor tersebut naik dan akan menimbulkan terjadinya inflasi. Guna mengatasi *shortages* tersebut, biasanya pemerintah negara berkembang cenderung menganut kebijaksanaan industri substitusi impor, terutama pada industri hilir, disertai dengan kebijaksanaan proteksi yang ketat, sehingga industri yang muncul adalah industri yang kurang efisien. Akibatnya harga barang-barang industri naik, yang disertai dengan peningkatan pendapatan sektor non-pertanian, sehingga lebih banyak lagi permintaan akan output pertanian (bahan makanan) dengan kondisi penawarannya yang inelastis, dan pada akhirnya akan timbul inflasi (Gunawan, 1991:28).

Pendapat kedua golongan yang bertentangan mengenai sumber inflasi dapat disimpulkan berikut ini. Golongan Monetaris berpendapat bahwa inflasi dapat memberikan suasana yang tidak sehat bagi pembangunan ekonomi, bahkan menjadi penghambat yang nyata sehingga guna mencapai pembangunan ekonomi yang berhasil, maka inflasi harus terlebih dulu dilenyapkan. Ekspansi moneter yang menyebabkan terjadinya inflasi harus diatasi melalui kebijaksanaan fiskal dan moneter yang ketat, sehingga terjadi kontraksi moneter, yang berarti terjadinya pengurangan *excess demand*. Kebijakan fiskal serta moneter yang tepat justru akan dapat mengurangi ketegangan struktural yang ada.

Dilain pihak, golongan Strukturalis berpendapat bahwa inflasi *inheren* dengan pembangunan, dan bahwa memang diperlukan upaya untuk meniadakan inflasi. Akan tetapi, kalau usaha stabilisasi tersebut justru menyebabkan terhambatnya pembangunan (kontraksi ekonomi), maka mereka lebih setuju tetap membiarkan terjadinya inflasi. Jadi bukan ekspansi moneter yang merupakan penyebab utama inflasi, melainkan ketegangan struktural dalam masyarakat. Ekspansi moneter memang mendukung lebih cepatnya laju inflasi, tetapi ekspansi moneter itu "dihasilkan" (induced) oleh struktur perekonomian yang ada. Dikatakan lebih lanjut, bahwa program stabilisasi moneter tidak akan menghilangkan inflasi, tetapi justru menyebabkan terjadinya stagnasi dalam pembangunan, sehingga untuk mengatasi inflasi justru perlu pembangunan ekonomi yang akan mengubah struktur (Gunawan, 1991:32).

2.2.3 Hubungan Defisit Anggaran Domestik Pemerintah Terhadap Inflasi

Peningkatan laju pertumbuhan uang beredar yang terus menerus pada akhirnya akan mengakibatkan kenaikan laju inflasi. Argumentasi yang sering dikemukakan adalah bahwa laju pertumbuhan uang beredar merupakan akibat dari defisit anggaran belanja pemerintah. Ada dua jenis kaitan yang mungkin antara defisit anggaran belanja dan laju pertumbuhan uang beredar. *Pertama*, dalam jangka pendek peningkatan defisit yang disebabkan oleh kebijaksanaan yang ekspansioner akan cenderung meningkatkan suku bunga nominal dan suku bunga riil. Apabila Bank Sentral menjadikan suku bunga sebagai target yang akan dicapai, maka Bank Sentral mungkin akan meningkatkan laju pertumbuhan uang beredar sehingga suku bunga itu tidak naik. *Kedua*, dalam jangka panjang pemerintah mungkin akan meningkatkan stok uang beredar sebagai perangkat guna menunjang penerimaan pemerintah (Dornbusch dan Stanley Fischer, 1997:595).

Defisit anggaran domestik pemerintah mencerminkan pembiayaan pengeluaran domestik dengan menggunakan penerimaan luar negeri, sehingga terjadi peningkatan jumlah uang primer yang menyebabkan ekspansi jumlah uang beredar. Karena tidak disertai peningkatan permintaan uang yang sebanding, menyebabkan terjadinya disequilibrium di pasar uang dan pasar barang (dalam bentuk naiknya tingkat harga), dan selanjutnya timbul inflasi (Gunawan, 1991:169).

Defisit anggaran domestik pemerintah yang diidentifikasi sebagai penyebab utama inflasi pada dasarnya merupakan analisis moneter, karena defisit tersebut sebagai unsur yang ikut menentukan jumlah uang beredar lewat mekanisme proses penyediaan uang atau likuiditas dari uang primer (*base money*). Proses peningkatan harga itu sendiri melalui mekanisme permintaan dan penawaran barang. Inflasi timbul karena dalam sektor riil ada kelebihan permintaan barang terhadap penawarannya (*excess demand for goods*). Pada sektor moneter, inflasi timbul karena ada kelebihan jumlah uang beredar atau penawaran uang lebih besar daripada permintaannya (*excess supply of money*) (Gunawan, 1991:25).

Dornbusch dan Fischer (1992:245) menyatakan bahwa ada interaksi dua arah antara defisit anggaran dan inflasi. Defisit anggaran yang besar dapat mendorong laju inflasi yang cepat, sehingga menyebabkan pemerintah melakukan pencetakan uang untuk membiayai defisit. Laju inflasi yang tinggi akan meningkatkan defisit anggaran dengan mengurangi nilai riil dari penerimaan pajak.

Nasution (dalam Gunawan, 1991:545) menjelaskan terjadinya inflasi sebagai akibat munculnya surplus anggaran luar negeri pemerintah (karena digunakan sistem anggaran berimbang, berarti terjadi defisit anggaran domestik pemerintah), yang hampir seluruh devisanya dibeli oleh BI. Sehingga terjadi proses pembentukan uang (*monetisasi*). Monetisasi anggaran belanja luar negeri pemerintah tersebut menjadi

penyebab utama bertambahnya jumlah uang beredar, sehingga menyebabkan tekanan inflasi bagi perekonomian.

D. Dutton (dalam Gunawan, 1991:29) berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah dalam nilai riil cenderung tetap besarnya. Apabila tingkat harga naik, nilai nominal pengeluaran akan naik secara proporsional dengan penerimaan pajak nominal yang cenderung tetap. Kecenderungan naiknya pengeluaran tersebut menimbulkan defisit anggaran pemerintah. Untuk mempertahankan pengeluaran guna membiayai pembangunan, maka pemerintah menempuh cara defisit anggaran dengan cara menarik pinjaman dari perbankan, masyarakat atau mencetak uang. Akibatnya akan timbul ekspansi moneter sehingga mendorong tingkat harga untuk naik, yang pada akhirnya akan menyebabkan inflasi.

Dilihat dari neraca pembayaran, surplus foreign anggaran pemerintah terbagi dalam dua bagian; sebagian tercermin didalam transaksi berjalan (*current account*) dalam bentuk ekspor dan impor barang dan jasa serta pembayaran bunga pinjaman, dan sebagian lagi tercermin didalam transaksi modal (*capital account*) dalam bentuk masuknya dana pinjaman luar negeri dan pembayaran pokok pinjaman luar negeri. Dalam kenyataannya, defisit domestik tidak selalu sama dengan surplus foreign. Selisih antara keduanya memberi sumbangan pada perubahan cadangan valuta asing Bank Indonesia (BI). Akibat perubahan cadangan valuta asing BI dan kenaikan kredit BI pada pemerintah dalam rupiah menimbulkan monetisasi defisit anggaran domestik pemerintah yang menyebabkan inflasi (Gunawan, 1991:24). Semakin besar komponen foreign dalam pengeluaran pemerintah berarti semakin kecil kemungkinan terjadinya monetisasi defisit anggaran domestik pemerintah, untuk selanjutnya tidak menyumbang pada inflasi. Tetapi secara tidak langsung inflasi terjadi melalui harga impor (*imported inflation*).

2.2.4 Hubungan Inflasi Terhadap Defisit Anggaran Domestik Pemerintah

Pernyataan bahwa inflasi merupakan fenomena moneter berarti bahwa laju pertumbuhan uang beredar yang tinggi secara berkelanjutan akan menghasilkan laju inflasi yang tinggi, dan laju pertumbuhan uang beredar yang rendah pada gilirannya akan mengakibatkan laju inflasi yang rendah. Selanjutnya, pernyataan bahwa inflasi merupakan fenomena moneter mengandung arti bahwa laju inflasi yang tinggi tidak akan berlangsung terus apabila tidak disertai dengan laju pertumbuhan uang beredar yang tinggi. Pandangan bahwa inflasi merupakan fenomena moneter adalah implikasi dari teori kuantitas uang yang merupakan tulang punggung makro ekonomi aliran Monetaris (Dornbusch dan Stanley Fischer, 1997:589).

Inflasi dalam suatu perekonomian negara lebih banyak diakibatkan oleh defisit anggaran pemerintah dan cepatnya pencetakan uang atau banyaknya jumlah uang beredar. Defisit anggaran merupakan akibat dari pengeluaran pemerintah yang lebih besar dari penerimaannya yang menyebabkan hutang pemerintah sangat besar.

Terjadi interaksi dua arah antara defisit anggaran dan inflasi. Defisit anggaran yang besar dapat mendorong laju inflasi yang cepat karena menyebabkan pemerintah meningkatkan pencetakan uang untuk membiayai defisit. Selanjutnya, laju inflasi yang tinggi akan meningkatkan defisit anggaran. Ada dua mekanisme utama yang menjelaskan bagaimana inflasi meningkatkan defisit anggaran (Dornbusch dan Fischer, 1997:604):

a. Sistem Pengumpulan Pajak

Meningkatnya laju inflasi maka penerimaan riil yang diperoleh dari pajak akan menurun. Hal ini disebabkan adanya tenggang waktu baik dalam perhitungan maupun pengumpulan pajak. Misalnya sebagai contoh: seseorang membayar pajak pada tanggal 15 April atas pendapatan yang diterima tahun sebelumnya sebesar Rp 50.000

dengan besarnya pajak yang harus dibayar sebesar Rp 10.000. Apabila harga (inflasi) meningkat 10 kali lipat, maka nilai riil pajak hanya sepersepuluh dari yang seharusnya. Defisit anggaran dengan demikian tidak terkendalikan lagi.

b. Suku Bunga Nominal

Suku bunga nominal meningkat sejalan dengan kenaikan laju inflasi, dan menambah defisit anggaran yang terukur. Untuk lebih jelasnya kita lihat persamaan dibawah ini:

$$\text{Total defisit} = \text{defisit primer} + \text{pembayaran bunga}$$

Defisit primer/defisit tanpa bunga ialah seluruh pengeluaran pemerintah kecuali pembayaran bunga, dikurangi dengan seluruh penerimaan pemerintah. Jadi, total defisit adalah defisit primer ditambah pembayaran bunga atas hutang pemerintah. Misalkan hutang pemerintah berada pada keadaan yang relatif rendah sekitar 20 persen dari PNB. Dengan suku bunga yang misalkan sebesar 10 persen maka jumlah pembayaran bunga hanya 2 persen dari PNB (10 persen suku bunga \times 20 persen porsi hutang terhadap PNB). Jika laju inflasi meningkat sebesar 90 persen dan suku bunga riil tidak berubah sehingga suku bunga nominal naik menjadi 100 persen. Oleh karena itu total pembayaran bunga menjadi 20 persen dari PNB (100 persen suku bunga \times 20 persen porsi hutang terhadap PNB), hal ini menyebabkan defisit anggaran meningkat tidak kurang dari 18 persen terhadap PNB. Dengan demikian defisit anggaran tidak terkendalikan lagi.

Inflasi (harga-harga) yang terus meningkat menjadikan daya beli stok uang nominal yang ada pada masyarakat akan menurun. Untuk mempertahankan agar nilai riil dari uang nominal tersebut tetap konstan maka masyarakat harus menambah stok uang nominalnya dengan jumlah yang sesuai guna mengimbangi efek inflasi. Salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi masalah itu adalah dengan menaikkan gaji (upah) pegawai ataupun menambah subsidi untuk barang atau jasa yang banyak

diperlukan masyarakat yang diharapkan bisa mengimbangi inflasi. Keadaan tersebut menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin meningkat dan pada akhirnya defisit anggaran pemerintah tidak dapat dihindarkan lagi (Arsjad dan Bambang Kusumanto, 1992:32).

2.2.5 Hipotesis

Defisit anggaran domestik pemerintah diidentifikasi sebagai penyebab utama inflasi, karena defisit anggaran domestik pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri dapat menyebabkan bertambahnya jumlah uang beredar melalui penambahan uang primer (*base money*). Inflasi yang meningkat juga akan meningkatkan defisit anggaran domestik pemerintah, karena penerimaan utama pemerintah, yaitu penerimaan riil pajak akan menurun karena terjadinya inflasi. Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan tujuan penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: kausalitas antara Defisit Anggaran Domestik Pemerintah terhadap Inflasi pada perekonomian Indonesia tahun 1986-2000 adalah dua arah/timbal balik (*bidirectional causality*).



III. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitif, yaitu metode penelitian yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis (Surakhmad, 1994:140).

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah hubungan defisit anggaran domestik pemerintah dengan inflasi di Indonesia pada tahun 1986-2000. Periode Tahun 1986-2000 digunakan, Karena pada tahun tersebut keadaan perekonomian Indonesia khususnya variabel defisit anggaran domestik pemerintah dan tingkat inflasi fluktuatif dan cenderung meningkat tajam dari tahun ke tahun.

3.1.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan cara mengutip data sekunder yang diperoleh dari : laporan BI dalam statistik keuangan, laporan BPS terbitan tahun yang dipublikasikan untuk tahun pengamatan. Data pokok pengamatan ini adalah data mengenai defisit domestik anggaran pemerintah dan tingkat inflasi, serta data lain sebagai data pendukung. Data yang dipergunakan adalah *time series* yaitu, data yang dapat menggambarkan perkembangan dari waktu ke waktu variabel-variabel yang digunakan.

3.2 Metode Analisis Data

Alat analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep kausalitas versi Granger. Konsep Kausalitas Granger dikenal sebagai konsep kausalitas sejati atau konsep prediktabilitas (Predictability

Concept), dimana masa lalu dapat mempengaruhi masa kini atau masa datang, akan tetapi masa kini atau masa datang tidak dapat mempengaruhi masa lalu. Formulasi dari kausalitas Granger adalah sebagai berikut (Arief, 1993:152) :

$$X_t = \sum_{i=1}^m a_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^n b_j Y_{t-j} + U_t$$

$$Y_t = \sum_{i=1}^r c_i Y_{t-i} + \sum_{j=1}^s d_j X_{t-j} + V_t$$

Dimana :

X_t = besarnya defisit domestik anggaran pemerintah pada kurun waktu ke-n

Y_t = besarnya inflasi yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen pada kurun waktu ke-n

m, n, r, s = time lag

a_i = koefisien regresi dari X pada $X = f(Y)$

b_j = koefisien regresi dari Y pada $X = f(Y)$

c_i = koefisien regresi dari Y pada $Y = f(X)$

d_j = koefisien regresi dari X pada $Y = f(X)$

U_t, V_t = error terms diasumsikan tidak mengandung korelasi serial

Permasalahan yang perlu diperhatikan dalam formulasi diatas adalah adanya time lag dalam model regresi tersebut. Dimana diasumsikan bahwa perubahan pada suatu variabel bebas akan mengakibatkan perubahan variabel terikat setelah suatu selang waktu tertentu.

Hasil-hasil kedua bentuk model regresi linier ini menghasilkan empat kemungkinan mengenai nilai koefisien regresi, yaitu:

1. jika $\sum_{j=1}^n b_j \neq 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j = 0$, maka terdapat kausalitas satu arah dari Y

ke X

2. jika $\sum_{j=1}^n bj = 0$ dan $\sum_{j=1}^s dj \neq 0$, maka terdapat kausalitas satu arah dari X ke Y
3. jika $\sum_{j=1}^n bj = 0$ dan $\sum_{j=1}^s dj = 0$, maka X dan Y bebas antara satu dengan yang lain
4. jika $\sum_{j=1}^n bj \neq 0$ dan $\sum_{j=1}^s dj \neq 0$, maka terdapat kausalitas dua arah antara Y dan X.

3.3 Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran

Menghindari salah pengertian dan luasnya permasalahan dalam penulisan ini, maka perlu adanya batasan-batasan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Defisit anggaran domestik pemerintah adalah kecenderungan naiknya pengeluaran pemerintah, yang tidak diimbangi atau tidak bisa dipenuhi dari penerimaan dalam negeri, sehingga pengeluaran pemerintah harus dibiayai dengan penerimaan yang berasal dari hutang luar negeri. Perkiraan defisit domestik anggaran pemerintah dalam penelitian ini didasarkan pada overall defisit, yaitu (Gunawan, 1991:202):

Penerimaan Dalam Negeri = Minyak Bumi dan Gas Alam + Pajak

Pengeluaran Total = Pengeluaran Rutin + Pengeluaran Pembangunan

Defisit Domestik = Pengeluaran Total – Penerimaan dalam Negeri

2. Inflasi merupakan proses kecenderungan kenaikan harga-harga umum barang dan jasa secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama. Perhitungan inflasi didasarkan atas perubahan Indeks Harga Konsumen (*consumer price index*). IHK digunakan karena faktor tersedianya data dan terutama karena digunakannya IHK sebagai indikator secara resmi oleh pemerintah. Formulasi perhitungannya adalah (Widodo, 1990:46) :

2. jika $\sum_{j=1}^n b_j = 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j \neq 0$, maka terdapat kausalitas satu arah dari X ke Y
3. jika $\sum_{j=1}^n b_j = 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j = 0$, maka X dan Y bebas antara satu dengan yang lain
4. jika $\sum_{j=1}^n b_j \neq 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j \neq 0$, maka terdapat kausalitas dua arah antara Y dan X.

3.3 Definisi Variabel Operasional dan Pengukuran

Menghindari salah pengertian dan luasnya permasalahan dalam penulisan ini, maka perlu adanya batasan-batasan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Defisit anggaran domestik pemerintah adalah kecenderungan naiknya pengeluaran pemerintah, yang tidak diimbangi atau tidak bisa dipenuhi dari penerimaan dalam negeri, sehingga pengeluaran pemerintah harus dibiayai dengan penerimaan yang berasal dari hutang luar negeri. Perkiraan defisit domestik anggaran pemerintah dalam penelitian ini didasarkan pada overall defisit, yaitu (Gunawan, 1991:202):

Penerimaan Dalam Negeri = Minyak Bumi dan Gas Alam + Pajak

Pengeluaran Total = Pengeluaran Rutin + Pengeluaran Pembangunan

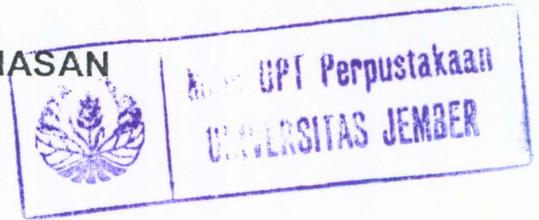
Defisit Domestik = Pengeluaran Total – Penerimaan dalam Negeri

2. Inflasi merupakan proses kecenderungan kenaikan harga-harga umum barang dan jasa secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama. Perhitungan inflasi didasarkan atas perubahan Indeks Harga Konsumen (*consumer price index*). IHK digunakan karena faktor tersedianya data dan terutama karena digunakannya IHK sebagai indikator secara resmi oleh pemerintah. Formulasi perhitungannya adalah (Widodo, 1990:46) :

$$\text{Inflasi}_t = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$$



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN



4.1 Gambaran Umum Variabel Pengamatan

4.1.1 Perkembangan Defisit Anggaran Domestik Pemerintah Indonesia

Perekonomian Indonesia menghadapi kendala struktural, terutama masalah finansial. Sektor swasta yang belum kuat menyebabkan peranan anggaran pemerintah sangat menentukan investasi masyarakat. Pengeluaran pemerintah dalam APBN masih merupakan keharusan bagi tumbuhnya investasi masyarakat. Tetapi pengeluaran ini tidak diimbangi penerimaan, sehingga timbul defisit struktural dalam keuangan negara (kesenjangan pendapatan negara). Sejak Orde Baru, kesenjangan pendapatan belanja negara dibiayai dengan pinjaman luar negeri yang memungkinkan terjadinya inflasi (Gunawan, 1991:86).

Penerimaan yang berasal dari bantuan luar negeri (penerimaan pembangunan) meningkat seiring dengan meningkatnya penerimaan dalam negeri. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara kedua penerimaan tersebut, perkembangan penerimaan dalam negeri lebih lambat daripada penerimaan yang berasal dari bantuan luar negeri. Penerimaan dalam negeri rata-rata pertumbuhannya sebesar 4,78 persen dan penerimaan yang berasal dari bantuan luar negeri sebesar 7,87 persen (tabel.2).

Penerimaan dalam negeri cenderung terus mengalami kenaikan. Tahun anggaran 1997/1998 penerimaan dalam negeri meningkat 24,45 persen dari tahun sebelumnya mencapai Rp. 112.275 Milyar. Kenaikan ini disebabkan semakin tingginya daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional karena depresiasi rupiah terhadap dollar AS akibat terjadinya krisis moneter mulai pertengahan Juli 1997. Depresiasi rupiah juga akan menyebabkan meningkatnya pinjaman luar negeri.

Tabel 2.
Realisasi Anggaran Penerimaan Negara Indonesia
Tahun 1985/1986 -1999/2000 (Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Dalam Negeri	Penerimaan Pembangunan
1985/1986	20 939	2 829
1986/1987	17 385	5 513
1987/1988	21 731	5 556
1988/1989	23 414	10 124
1989/1990	31 504	8 330
1990/1991	42 193	8 382
1991/1992	42 582	9 975
1992/1993	48 863	11 098
1993/1994	56 113	10 753
1994/1995	66 418	9 838
1995/1996	73 014	9 009
1996/1997	87 630	11 900
1997/1998	112 275	23 817
1998/1999	158 905	56 225
1999/2000	201 693	43 633

Sumber: Nota Keuangan dan APBN, BPS 1986-2000

Pinjaman luar negeri (Penerimaan Pembangunan) mulai tahun anggaran 1985/1986 mengalami kenaikan sampai sebesar Rp.11 098 Milyar pada tahun 1992/1993. Kemudian turun mulai tahun anggaran 1993/1994-1995/1996 menjadi sebesar Rp.9 009 Milyar. Penurunan ini diakibatkan adanya kebijakan pemerintah atas pengurangan ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan usaha untuk melunasi pinjaman yang mempunyai suku bunga tinggi. Tahun 1998 kenaikan pinjaman luar negeri adalah dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu mencapai Rp.23 817 Milyar. Hal ini dikarenakan adanya gangguan eksternal maupun internal, seperti ketidakstabilan ekonomi dan gejolak keamanan dalam negeri. Kondisi tersebut akhirnya menyebabkan pemerintah mengandalkan pinjaman luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan dalam anggaran pemerintah.

Tabel 3.
Realisasi Pengeluaran Negara dan
Defisit Anggaran Domestik Indonesia
Tahun 1985/1986-1999/2000 (Milyar Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Rutin	Pengeluaran Pembangunan	Defisit Anggaran Domestik
1985/1986	12 007	11 740	2 808
1986/1987	13 717	9 091	5 423
1987/1988	17 340	9 770	5 379
1988/1989	20 935	12 317	9 838
1989/1990	24 335	15 394	8 225
1990/1991	29 121	18 251	5 179
1991/1992	29 053	23 075	9 546
1992/1993	33 605	26 906	11 648
1993/1994	40 290	28 428	12 605
1994/1995	44 069	30 692	8 343
1995/1996	50 435	28 428	6 202
1996/1997	62 561	35 952	10 883
1997/1998	89 610	38 359	15 694
1998/1999	147 717	67 869	56 681
1999/2000	166 881	78 311	43 499

Sumber: Nota Keuangan dan APBN, BPS 1986-2000

Pada sisi pengeluaran (Tabel. 3) terlihat bahwa pengeluaran rutin selalu mengalami peningkatan dalam nilai nominalnya, sekalipun dengan kecepatan yang berbeda dari tahun ke tahun. Namun, hal ini tidak berarti bahwa secara riil pengeluaran rutin selalu mengalami peningkatan. Belanja pegawai misalnya, sering dijadikan salah satu perangkat program stabilisasi yang ternyata memang cukup ampuh. Tetapi sebagai akibatnya gaji riil pegawai negeri praktis tidak mampu mengejar kenaikan harga-harga umum sehingga standar gaji pegawai negeri Indonesia, khususnya untuk mereka yang berada di kota-kota besar, sudah tidak dikatakan kecil lagi, melainkan sama sekali tidak realistis. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir sekitar separuh anggaran rutin harus dialokasikan untuk pembayaran cicilan dan bunga pinjaman luar negeri, sehingga ruang

gerak pemerintah semakin terbatas untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.

Sebaliknya, angka pengeluaran pembangunan menunjukkan perkembangan yang tidak berpola; adakalanya naik dan terkadang turun secara drastis. Pola demikian tidak terlepas dari dianutnya doktrin "Anggaran Berimbang", sehingga bisa saja realisasi pengeluaran, khususnya pengeluaran pembangunan, jauh melebihi rencananya (misalnya untuk tahun anggaran 1988/1989, 1990/1991 dan 1991/1992). Kesenjangan antara rencana dan realisasi pengeluaran ini sejalan dengan realisasi penerimaan (Basri, 1997:114).

Perkembangan defisit anggaran domestik pemerintah sejak tahun 1985/1986 belum cukup menggembirakan, walaupun terjadi penurunan yang cukup besar dari Rp.9 838 Milyar pada tahun 1988/1989 menjadi sebesar Rp.8 225 Milyar dan Rp.5 179 Milyar dalam tahun 1989/1990 dan 1990/1991. Penurunan tersebut juga terjadi pada tahun 1994/1995 dan 1995/1996 tetapi pada tahun 1998/1999 defisit anggaran domestik mengalami kenaikan yang sangat besar yaitu Rp.13 287 Milyar (1997/1998) menjadi Rp.56 681 Milyar pada tahun 1998/1999.

Perkembangan defisit anggaran domestik pemerintah selama periode 1985/1986-1999/2000 ternyata cukup pesat sekali. Peningkatan yang pesat ini seperti yang telah diuraikan diatas terutama bersumber pada sangat lemahnya komponen dalam negeri (domestik) dalam penerimaan pemerintah disertai oleh peningkatan pengeluaran domestik yang cepat. Sementara utang luar negeri (penerimaan pembangunan) meningkat cukup cepat. Peningkatan defisit anggaran domestik pemerintah inilah yang mempengaruhi tingkat harga umum (Gunawan, 1991:226).

4.1.2 Perkembangan Inflasi di Indonesia

Inflasi merupakan masalah ekonomi yang dominan disamping masalah defisit anggaran pembayaran yang dialami oleh Indonesia. Indonesia mengalami hiper-inflasi tahun 1963, inflasi sebesar 128 persen naik menjadi 594 persen pada tahun 1966 dan memuncak menjadi 635 persen pada tahun 1966. Ini berarti bahwa harga-harga umum naik sebesar 6 kali lipat dalam satu tahun (Sinungan, 1987:50). Inflasi setinggi ini terjadi karena sektor produksi tidak dapat bekerja seperti yang diharapkan. Akibatnya barang dan jasa yang tersedia tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat, dengan kata lain permintaan lebih besar dibandingkan penawaran. Pemerintah pada waktu itu mencetak uang lebih banyak dari seharusnya untuk menutup pembelanjaan atau pengeluaran negara, dengan demikian uang beredar bertambah banyak. Akibatnya nilai uang merosot dengan drastis dan tingkat harga meningkat secara tajam (Taufiq, 1997:47).

Inflasi di Indonesia dalam perkembangannya dari tahun ke tahun selama periode 1986-2000, terlihat cukup bergejolak. Besarnya tingkat inflasi di Indonesia yang diukur dengan menggunakan perubahan IHK bisa dilihat pada Tabel 4.

Tahun 1983 merupakan awal dari munculnya cukup banyak perubahan kebijaksanaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut mengarah pada deregulasi di dua sektor perdagangan Indonesia yaitu sektor keuangan dan sektor perdagangan luar negeri ditambah dengan insentif pada dunia usaha di dalam negeri yang menyebabkan tingkat inflasi pada awal Pelita IV dapat ditekan hingga satu digit (Gunawan, 1991:80).

Tahun 1987, inflasi masih berada pada tingkat diatas 5 persen per tahun. Tahun 1988 pemerintah kembali menggulirkan kebijaksanaan untuk mengurangi inflasi melalui upaya pengerahan dana masyarakat. Tight Money Policy (TMP) tahun 1990 yang lebih dikenal sebagai Gebrakan Sumarlin I berupa peningkatan suku bunga SBI yang ditujukan

untuk pengendalian uang beredar belum berhasil menurunkan inflasi. Tingginya tingkat inflasi pada tahun 1990-1991 dipengaruhi oleh perekonomian Indonesia yang memanas (*overheated*). Solusi yang dianggap paling cepat memberi hasil terhadap tingginya tingkat inflasi adalah dengan meningkatkan suku bunga (uang ketat). Tahun 1991 pemerintah kembali mengeluarkan kebijaksanaan Gebrakan Sumarlin II, berupa pengalihan deposito BUMN dan Bank Pemerintah menjadi SBI (Pangestu, 1992:248). Kebijakan ini berhasil menurunkan inflasi dari 9,52 persen pada tahun 1991 menjadi 4,94 persen tahun 1992 sejalan dengan ketatnya peredaran uang.

Tabel 4.
Laju Inflasi Tahunan di Indonesia Berdasarkan Perubahan Indeks Harga Konsumen 1986-2000

Tahun	IHK	Tingkat Inflasi
1986	264,74	8,83
1987	289,13	8,90
1988	329,09	5,47
1989	331,06	5,97
1990	354,19	9,53
1991	386,87	9,52
1992	414,99	4,94
1993	456,15	9,77
1994	497,01	9,24
1995	421,93	8,64
1996	586,94	6,47
1997	629,80	11,05
1998	516,42	77,63
1999	243,12	2,01
2000	265,85	9,35

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS Tahun 1986-2000

Inflasi mengalami peningkatan pada tahun 1993 yaitu 9,77 persen. Naiknya inflasi ini disebabkan oleh kenaikan gaji pegawai negeri, penyesuaian harga BBM dan kenaikan tarif listrik yang secara simultan

merupakan faktor pendorong inflasi. Memasuki Pelita VI pemerintah mulai memberi perhatian terhadap stabilitas ekonomi. Tingkat inflasi selama tahun 1994-1996 menunjukkan fluktuatif, masing-masing tercatat 9,2 persen, 8,6 persen, 6,5 persen. Tingginya inflasi pada tahun 1995 dipengaruhi oleh: (1) meningkatnya laju investasi pada tahun 1994. Seluruh investasi yang disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama satu tahun tercatat mencapai Rp 100 Trilyun, dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 50 Trilyun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US\$ 24 Milyar; (2) kebijaksanaan di sektor riil, seperti kenaikan Harga Pedoman Setempat (HPS) semen; (3) apresiasi Yen yang berpengaruh terhadap jumlah produk yang mengandung komponen eks Jepang (Prasetyantono, 1995:127).

Akhir tahun 1997 inflasi kembali naik menjadi 11,5 persen. Naiknya inflasi ini merupakan dampak dari krisis moneter yang melanda Asia sejak pertengahan 1997. Tekad pemerintah untuk menekan inflasi dibawah 5 persen pada tahun 1997 ini tidak terwujud, hal ini disebabkan karena konfigurasi ekonomi makro yang berpotensi menggiring ke perekonomian yang cepat memanas (*overheating*) manakala pertumbuhan ekonomi mulai tumbuh 7 persen, selain itu juga laju pertumbuhan kredit perbankan yang tumbuh diatas 20 persen telah menambah jumlah uang beredar dan berdampak inflatoir melalui mekanisme pasar uang (Uphadi, 1997:40).

Tahun 1998 tekanan inflasi semakin tinggi mencapai 77,63 persen. Perkembangan ini terjadi karena adanya fenomena *Flight to Currency* dan *Flight to Quality* serta adanya peningkatan spekulasi terhadap nilai tukar pada awal 1998. Selain itu tekanan inflasi juga disebabkan adanya kebocoran moneter sebagai akibat pemberian BLBI untuk mengatasi krisis kepercayaan kredit perbankan dan adanya ekspansi uang beredar yang kuat terutama bank rush yang semakin meluas pada bulan Januari 1998 sebagai akibat menurunnya kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan.

Tahun 1999 inflasi mulai turun seiring dengan mulai adanya kestabilan politik dan keamanan dalam negeri yang memberikan harapan terhadap perbaikan perekonomian. Namun pada tahun 2000 inflasi naik kembali cukup signifikan, Hal ini sedikit banyak disebabkan oleh keadaan politik dalam negeri yang agak memanas kembali yaitu terjadinya ketidakpastian yang cukup mengganggu kestabilan pemerintahan Indonesia, juga ditambah lagi bantuan luar negeri khususnya pinjaman dari IMF yang masih belum juga dikucurkan sehingga cukup menambah terhadap ketidakpastian perbaikan ekonomi.

4.2 Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Analisis Hubungan Kausalitas Inflasi dan Defisit Anggaran Domestik dengan Pendekatan Kausalitas Granger

Hasil regresi uji kausalitas Granger yang menunjukkan pengaruh antara inflasi atas dasar indikator IHK dan Defisit Anggaran Domestik dengan menggunakan kendala yaitu lag 4 dan lag 2 ditunjukkan dalam tabel 5 dan 6 Sebagai berikut :

Tabel 5.
Hasil Regresi Uji Granger : Inflasi terhadap Defisit Anggaran Domestik

Variabel Penjelas	DAD atas 4 lag INF dan 4 lag DAD		DAD atas 2 lag INF dan 2 lag DAD	
	Sebelumnya		Sebelumnya	
	Koefisien	t – statistik	Koefisien	t – statistik
DAD (-1)	0,3073358	1,2076422	0,3230630	1,1268558
DAD (-2)	-1,1802713	-3,2473209	-0,4289776	-1,5474900
DAD (-3)	0,0770003	0,2286011		
DAD (-4)	0,1446129	0,4528463		
INF (-1)	2,8164088	6,2859426 ^a	2,4237426	5,4598027 ^c
INF (-2)	0,9057048	0,9858620	-0,1541058	-0,2003876
INF (-3)	-5,5300168	-1,2730261 ^b		
INF (-4)	3,5084936	0,9514962		
R ²	0,953863		0,748496	
S.E of Reg	24,41028		33,20747	
F- Stat	8,860556		8,928234	
DW – Stat	2,911065		1,899851	

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan tabel 5 diperoleh suatu analisis mengenai nilai koefisien regresi yang dilihat dari hasil perbandingan antara t-statistik dengan t-tabel menunjukkan masing-masing hasil nilai t-statistik sebagai berikut :

- a. signifikan pada tingkat 1% dengan tingkat keyakinan 99 % yang menunjukkan nilai t statistik sebesar 6,2859426 dan t tabel (0,005,3) sebesar 5,841.
- b. signifikan pada tingkat 30% dengan tingkat keyakinan 70 % yang menunjukkan nilai t statistik sebesar -1,2730261 dan t tabel (0,15,3) sebesar -1,2605.
- c. signifikan pada tingkat 1% dengan tingkat keyakinan 99 % yang menunjukkan nilai t statistik sebesar 5,4598027 dan t tabel (0,005,9) sebesar 3,250.

Masing-masing hasil nilai t statistik dapat dikemukakan bahwa dari hasil analisis uji Granger dengan menggunakan lag 4 menunjukkan dua nilai t statistik yang signifikan tidak sama dengan nol, atau $b_j \neq 0$ dengan tingkat keyakinan masing-masing 99 % pada variabel INF(-1) dan 70 % pada variabel INF(-3) dan dua nilai t statistik yang tidak signifikan sama dengan nol, dengan melihat nilai R^2 yang besar (0,95) dan nilai F hitung yang signifikan pada tingkat keyakinan 95 % maka hasil analisis uji Granger tersebut diatas dapat dikatakan terdapat pengaruh inflasi terhadap defisit anggaran domestik. Pada lag 2 hasil nilai t statistik analisis uji Granger menunjukkan satu nilai t statistik yang signifikan tidak sama dengan nol dengan tingkat keyakinan 99 % pada variabel INF(-1) dan satu nilai t statistik yang tidak signifikan sama dengan nol, dengan melihat nilai R^2 yang cukup besar (0,74) dan nilai F hitung yang signifikan pada tingkat keyakinan 95 % maka hasil analisis uji Granger tersebut diatas dapat dikatakan terdapat pengaruh inflasi terhadap defisit anggaran domestik atau secara statistik dalam kriteria uji Granger dapat dikatakan hasil nilai t statistik dan F statistik secara umum signifikan tidak sama dengan nol, atau $b_j \neq 0$.

Tabel 6.
Hasil Regresi uji Granger : Defisit Anggaran Domestik
Terhadap Inflasi

Variabel Penjelas	DAD atas 4 lag INF dan 4 lag DAD		DAD atas 2 lag INF dan 2 lag DAD	
	Sebelumnya		Sebelumnya	
	Koefisien	t – statistik	Koefisien	t – statistik
INF (-1)	-0,1833936	-0,3916458	0,2414560	0,7413445
INF (-2)	-0,1924194	-0,2004071	0,0793140	0,1405702
INF (-3)	-1,7905008	-0,3943847		
INF (-4)	4,8386405	1,2555799		
DAD (-1)	0,1933124	0,7268076	0,1405198	0,6680520
DAD (-2)	-0,5313527	-1,3988170	-0,2103272	-1,0341422
DAD (-3)	0,0706509	0,2006956		
DAD (-4)	-0,1349588	-0,4043705		
R ²	0,56135		0.035824	
S.E of Reg	25,51162		22.19037	
F- Stat	0,552445		0.111465	
DW – Stat	2,802127		2.334206	

Sumber : lampiran 4

Berdasarkan tabel 6 Diperoleh suatu analisis mengenai nilai koefisien regresi yang dilihat dari hasil perbandingan antara t-statistik dengan t-tabel menunjukkan masing-masing hasil nilai t-statistik yang lebih kecil dari nilai t-tabel, hal ini berarti bahwa hasil tersebut tidak signifikan. Artinya variabel defisit anggaran domestik tidak mempengaruhi variabel inflasi. Hasil diatas menunjukkan bahwa pada kendala lag 4 terdapat banyak nilai t-statistik pada masing-masing nilai koefisien regresi variabel inflasi yang tidak signifikan sama dengan nol, maka $dj = 0$, begitu juga pada kendala/lag 2 nilai-nilai t-statistik dari koefisien regresi variabel inflasi sama dengan nol, maka $dj = 0$. Hal ini juga ditunjukkan dengan nilai F hitung yang tidak signifikan sehingga hasil F hitung ini juga mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh dari Defisit Anggaran

Domestik terhadap inflasi di Indonesia selama kurun waktu penelitian yaitu tahun 1986 – 2000.

Berdasarkan tabel 7 dan 8 terlihat hasil yang menunjukkan adanya pola hubungan antara inflasi dan Defisit Anggaran Domestik sebagai berikut (lihat tabel 7).

Tabel 7 :
Kriteria Hasil Pengujian Koefisien Regresi
antara INF dan DAD

Lag	DAD = f(INF) (bj)	INF = f(DAD) (dj)	Kriteria Koefisien Regresi Hasil Pengujian
4	≠ 0	= 0	Terdapat hubungan kausalitas satu arah dari Inflasi ke Defisit Anggaran Domestik.
2	≠ 0	= 0	Terdapat hubungan kausalitas satu arah dari Inflasi ke Defisit Anggaran Domestik.

Sumber : tabel 1 dan 2

Tabel 7 menunjukkan bahwa terdapat kausalitas satu arah yaitu dari Inflasi ke Defisit Anggaran Domestik dengan menggunakan kendala/lag 4 dan lag 2. Regresi dengan menggunakan 4 lag dan 2 lag pada tingkat *degree of freedom* (df) sama dengan 8, menunjukkan bahwa terjadi kausalitas satu arah dari Inflasi ke Defisit Anggaran Domestik. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 5 dan 6 seperti tersebut diatas.

4.2.2 Pembahasan

Analisis hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat antara dua variabel merupakan analisis runtun waktu (*time series*) jangka panjang. Penelitian mengenai kausalitas dalam analisis ekonometrika, antara variabel-variabel ekonomi bagaikan dua sisi keping mata uang, sehingga kontribusi Granger (1969) tentang definisi kausalitas dalam konteks analisis runtun waktu merupakan sumbangan besar, terutama bagi para ahli tori dan praktisi ekonometrika. Konsep kausalitas Granger dikenal juga sebagai konsep kausalitas sejati atau konsep prediktabilitas

(*Predictability Concept*) dimana masa lalu dapat mempengaruhi masa kini atau masa datang, akan tetapi masa kini atau masa yang akan datang tidak dapat mempengaruhi masa lalu (Dumairy, 1987:4).

Hasil penelitian atas hubungan kausalitas defisit anggaran domestik dengan inflasi, dalam hubungan runtun waktu (1986-2000) menunjukkan adanya mekanisme hubungan satu arah. Hal ini ditunjukkan oleh hasil dari nilai t statistik masing-masing koefisien regressor yang signifikan tidak sama dengan nol. Kenaikan inflasi menyebabkan defisit anggaran domestik pemerintah meningkat, sebaliknya kenaikan defisit anggaran domestik tidak menyebabkan kenaikan inflasi. Penggunaan beda kala / lag pada penelitian di atas memperlihatkan adanya pola kausalitas yang berbeda. Pada penggunaan beda kala / lag 4 dan lag 2 dari inflasi ke defisit anggaran domestik menunjukkan adanya hubungan satu arah dari inflasi ke defisit anggaran domestik. Sementara pada penggunaan lag 4 dan 2 dari defisit anggaran domestik ke inflasi menunjukkan tidak adanya hubungan atau dengan kata lain tidak terdapat pengaruh dari defisit anggaran domestik ke inflasi.

Berdasarkan hasil analisa uji Granger di atas yang dilakukan selama 15 tahun pengamatan yaitu dari tahun 1986 – 2000 menunjukkan adanya hubungan satu arah yaitu dari inflasi ke defisit anggaran domestik. Artinya kenaikan inflasi akan menyebabkan kenaikan defisit anggaran domestik. Hal ini dapat dijelaskan melalui hubungan inflasi dan defisit anggaran domestik. Dimana terdapat keterkaitan antara inflasi dan defisit anggaran domestik. Secara teori laju inflasi (kenaikan harga-harga secara umum) yang tinggi akan menyebabkan peningkatan defisit anggaran domestik. Terdapat dua mekanisme yang dapat ditunjukkan berkait dengan hubungan inflasi ke defisit anggaran domestik yaitu, *pertama* : sistem penerimaan pajak, meningkatnya laju inflasi menyebabkan penerimaan riil yang diperoleh dari pajak akan menurun. Hal ini disebabkan adanya tenggang waktu baik dalam perhitungan maupun pengumpulan pajak. *Kedua* : suku bunga nominal, suku bunga nominal

meningkat sejalan dengan kenaikan laju inflasi dan menambah defisit anggaran domestik, kenaikan inflasi yang berlanjut dengan meningkatnya suku bunga nominal menyebabkan beban bunga yang ditanggung pemerintah meningkat sehingga bunga hutang yang harus dibayar pemerintah semakin besar. Kenaikan inflasi juga menyebabkan daya beli stok uang nominal yang ada pada masyarakat semakin menurun. Untuk mempertahankan agar nilai riil dari uang nominal tersebut tetap konstan maka pemerintah harus menambah stok uang nominalnya dengan jumlah yang sesuai guna mengimbangi efek inflasi. Salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menaikkan gaji dan menambah subsidi untuk barang atau jasa yang banyak diperlukan oleh masyarakat yang ditujukan untuk mengimbangi laju inflasi. Keadaan tersebut menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin besar dan pada akhirnya defisit anggaran domestik pemerintah semakin meningkat. (Arsjad dan Bambang Kusmanto, 1992 : 23).

Sebaliknya pada hasil analisa uji Granger dari defisit anggaran domestik ke inflasi baik dengan menggunakan lag 4 maupun lag 2 menunjukkan hasil dari masing-masing nilai t hitung koefisien variabel regressor tidak signifikan sama dengan nol, atau $dj = 0$. Ini berarti Hasil analisa menunjukkan bahwa selama tahun pengamatan yaitu dari tahun 1986 – 2000 tidak terdapat pengaruh kenaikan defisit anggaran domestik pemerintah ke inflasi. Pada kenyataannya kenaikan defisit tidak harus selalu ditutup dengan penciptaan uang baru ataupun pinjaman luar negeri yang akan menambah jumlah uang beredar yang secara teori apabila jumlah uang yang beredar bertambah akan meningkatkan inflasi. Namun dalam hal ini penambahan jumlah uang beredarpun tidak selalu menyebabkan inflasi jika diiringi oleh daya beli masyarakat yang bertambah pula, atau pemerintah seiring dengan penambahan jumlah uang beredar melakukan serangkaian kebijakan untuk mengantisipasi timbulnya inflasi yaitu dengan menerapkan kebijakan-kebijakan baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal.

Perekonomian periode 1960 – 1982 memang terbukti pengaruh jumlah uang yang beredar meningkat dengan pesat dan ini merupakan salah satu faktor pendorongnya adalah defisit anggaran domestik (Gunawan, 1991:226) yang meningkat pesat, namun era setelah 1983 pemerintah telah melakukan berbagai paket kebijaksanaan yang diambil menyangkut beberapa hal pokok diantaranya adalah masalah antisipasi inflasi dan defisit anggaran domestik. Kebijakan pemerintah tersebut antara lain pemerintah melakukan devaluasi rupiah sebanyak dua kali, yakni sebesar 28 % tahun 1983 dan 31 % tahun 1986 dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia dan secara implisit juga dimaksudkan untuk “menolong” anggaran pemerintah, penjadualan kembali proyek-proyek investasi besar pemerintah, serta pengurangan subsidi (pangan dan BBM) dimaksudkan untuk menekan besarnya defisit anggaran pemerintah. Di sisi penerimaan pemerintah melakukan pembaharuan di bidang perpajakan untuk meningkatkan penerimaan non-migas pemerintah.

Selama kurun waktu penelitian terutama pada tahun 1990 dan 1991 penyebab tingginya inflasi disebabkan karena adanya kenaikan harga BBM, kenaikan gaji, tarif listrik dan gaji PNS secara simultan telah mendorong inflasi, walaupun disisi lain peningkatan jumlah uang beredar juga menyumbang pada laju inflasi namun hal ini bukan merupakan faktor yang paling dominan, juga sejalan dengan meningkatnya jumlah uang beredar pemerintah sebelumnya telah melakukan berbagai rancangan kebijakan guna mengantisipasi inflasi yang banyak disebabkan oleh faktor-faktor baik faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi antara lain penerapan kebijakan uang ketat tahun 1992 melalui gebrakan Sumarlin.

Hasil penelitian empiris ini ternyata tidak sesuai dengan penelitian empiris sebelumnya, yang dilakukan oleh Gunawan (1991) yang menyatakan bahwa, defisit anggaran domestik pemerintah mempengaruhi tingkat inflasi. Begitupun juga dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini (adanya hubungan dua arah antara defisit anggaran

domestik pemerintah dengan tingkat inflasi). Diduga tidak adanya hubungan antara defisit anggaran domestik pemerintah terhadap inflasi disebabkan adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam usaha menekan inflasi. Kebijaksanaan tersebut diantaranya adalah: Tahun 1990 pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan Tight Money Policy (TMP) yang lebih dikenal dengan Gebrakan Sumarlin I berupa peningkatan suku bunga SBI yang ditujukan untuk pengendalian uang beredar.

Gebrakan Sumarlin I belum berhasil menekan laju inflasi secara signifikan, selanjutnya pemerintah pada Tahun 1991 kembali mengeluarkan kebijaksanaan yaitu kebijaksanaan Gebrakan Sumarlin II. Kebijaksanaan tersebut berupa pengalihan deposito BUMN dan Bank Pemerintah menjadi SBI (Pangestu, 1992:248). Kebijakan ini berhasil menurunkan inflasi dari 9,5 persen pada tahun 1991 menjadi 4,9 persen tahun 1992 sejalan dengan ketatnya peredaran uang.

Tekanan inflasi yang semakin bergejolak dimulai pada saat terjadi krisis moneter di Indonesia. Dimulai akhir tahun 1997 yang gejalak awalnya dari menurunnya nilai mata uang Rupiah terhadap Dollar AS, yang kemudian memberikan efek terhadap kestabilan perekonomian Indonesia. Keadaan tersebut memberikan efek berlanjut terhadap goyahnya dunia perbankan, yang akhirnya banyak bank yang bangkrut dan dibekukan. Keadaan ini memicu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan Indonesia. Sektor riil pun juga mengalami kelesuan yang diakibatkan ketidakstabilan pada sektor moneter tersebut. Inflasi bertambah meningkat karena kondisi di luar ekonomi juga bergejolak yaitu, keadaan politik dan keamanan dalam negeri yang tidak menentu memicu inflasi semakin meningkat.

Melihat dari kenyataan tersebut ternyata banyak variabel yang memicu inflasi meningkat. Mulai dari sektor moneter, sektor riil sampai juga kestabilan politik dan keamanan khususnya pada periode 1986-2000. Hal ini membuktikan bahwa ternyata variabel-variabel lain lebih kuat

mempengaruhi inflasi daripada variabel defisit anggaran domestik pemerintah yang dikemukakan oleh hasil penelitian empiris sebelumnya.

Upaya pemerintah untuk menekan atau mengurangi defisit anggaran domestik pemerintah yaitu, pemerintah mengambil kebijaksanaan yang mengarah pada peningkatan penerimaan domestik untuk mengimbangi perkembangan pengeluaran domestik, serta mengurangi pengeluaran pemerintah yang bukan prioritas seperti penghematan belanja barang, pengurangan subsidi BBM maupun subsidi impor pangan.

Peningkatan penerimaan pemerintah melalui peningkatan tarif pajak (*tax rate*) dari pajak penjualan atas barang mewah, cukai tembakau, bea masuk atas komponen kendaraan bermotor, MPO (Menghitung Pajak Orang) dan pajak perseroan bagi perdagangan ekspor. Adanya Undang-Undang tentang pajak penghasilan tahun 1984 yang memberikan harapan baik bagi pembaharuan sistem perpajakan dan administrasi perpajakan di Indonesia guna meningkatkan penerimaan domestik pemerintah dari pajak langsung.

Pajak mempunyai pengaruh penting dalam pembangunan ekonomi dan berhasil tidaknya tergantung pada perbaikan sistem perpajakan dan pelaksanaannya (Suparmoko, 1992:270). Pengaruh kebijaksanaan perpajakan terhadap perekonomian dapat dianalisis dalam dua tahap. *Pertama*, bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN. *Kedua*, bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian (Boediono, 1982:109). Demikian pula pada fungsi pajak sebagai (*reguled*), berarti pajak dijadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuannya.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian hubungan kausalitas defisit anggaran domestik pemerintah dengan tingkat inflasi dengan uji kausalitas Granger menunjukkan adanya hubungan satu arah dari inflasi ke defisit anggaran domestik pemerintah di Indonesia selama kurun waktu 1986 – 2000.

Hasil uji kausalitas Granger dengan menggunakan beda kala / lag baik lag 4 maupun lag 2 menunjukkan hubungan atau pengaruh inflasi terhadap defisit anggaran domestik pemerintah, dan tidak terdapat hubungan atau pengaruh dari defisit anggaran domestik pemerintah terhadap inflasi.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai hubungan kausalitas inflasi dengan defisit anggaran domestik pemerintah di Indonesia selama tahun 1986 – 2000, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya menekan inflasi pada tingkat yang wajar seharusnya diikuti dengan pengendalian defisit anggaran domestik.
2. Kebijakan anggaran seharusnya diarahkan pada pengekangan dan penurunan besarnya defisit anggaran domestik pemerintah. Sisi penerimaan pemerintah perlu diusahakan peningkatan sumber-sumber penerimaan domestik, terutama penerimaan domestik yang kurang / tidak memberikan pengaruh inflasi dalam perekonomian. Seperti, peningkatan beberapa komponen pajak langsung (pajak pendapatan, pajak perseroan dan lain-lain)

3. Kebijakan pengeluaran pemerintah sesuai dengan pengendalian inflasi, perlu diarahkan pada pengurangan pengeluaran domestik pemerintah yang kurang begitu perlu. Beberapa pengeluaran yang bersifat pemborosan dana pembangunan seperti belanja barang untuk keperluan pribadi pejabat, subsidi BBM yang terlalu membengkak, dan proyek-proyek besar yang lebih bersifat prestige daripada ekonomis.



Basri, Yusuf. 1986. *Indikator Ekonomi Jakarta*

----- 1987. *Indikator Ekonomi Jakarta*

----- 1988. *Indikator Ekonomi Jakarta*

----- 1989. *Indikator Ekonomi Jakarta*

Basri, Faizal. 1987. *Perkembangan Indonesia Menjelang Abad 200*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Soediono. 1982. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE-UGM

Djamil, Zulkarnain. 1983. *Perkonomian Indonesia*. Jakarta: 1980-198

3. Kebijakan pengeluaran pemerintah sesuai dengan pengendalian inflasi, perlu diarahkan pada pengurangan pengeluaran domestik pemerintah yang kurang begitu perlu. Beberapa pengeluaran yang bersifat pemborosan dana pembangunan seperti belanja barang untuk keperluan pribadi pejabat, subsidi BBM yang terlalu membengkak, dan proyek-proyek besar yang lebih bersifat prestige daripada ekonomis.



DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2000. *Ekonomi Indonesia Baru*. Gramedia: Jakarta
- Abimanyu, Anggito dan Deni Puspa. 1998. Komentor atas Makalah: *Ekspektasi Inflasi di masa Krisis*, dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol I, No.2, September, Hal 127-130.
- Arief, Sritua. 1993. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: UI-Press
- Arsjad, Nurjaman dan Bambang Kusumanto. 1992. *Keuangan Negara*. Jakarta: Intermedia.
- Bank Indonesia. 1986. *Statistik Keuangan*, dalam Laporan Tahunan Bank Indonesia. Jakarta
- . 1990. *Statistik Keuangan*, dalam Laporan Tahunan Bank Indonesia. Jakarta
- . 1995. *Statistik Keuangan*, dalam Laporan Tahunan Bank Indonesia. Jakarta
- . 2000. *Statistik Keuangan*, dalam Laporan Tahunan Bank Indonesia. Jakarta
- Biro Pusat Statistik. 1986. *Indikator Ekonomi*. Jakarta
- . 1990. *Indikator Ekonomi*. Jakarta
- . 1995. *Indikator Ekonomi*. Jakarta
- . 2000. *Indikator Ekonomi*. Jakarta
- Basri, Faisal. 1997. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Boediono. 1982. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Djamin, Zulkarnain. 1993. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: LPFE-UI
- Dornbusch, R dan Fischer. 1997. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

- Dumairy. 1987. *Kausalitas Antara Uang beredar dan Inflasi di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, No.2, Hal. 13-14
- Gunawan, Anton Hermanto. 1991. *Anggaran Pemerintah dan Inflasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Insukindro. 1993. *Ekonomi uang dan Bank Teori dan Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Iswardono. 1991. *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Jhingan, ML. 1990. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali.
- Manurung, Ronald Pardamean. 1999. *Pengaruh Defisit anggaran Domestik Pemerintah Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 1982-1997*, Skripsi tidak dipublikasikan. Jember: FE-UNEJ
- Nopirin. 1992. *Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Pangestu, Mari. 1992. *Perkembangan dan Prospek Moneter*, Jurnal Analisis CSIS, Tahun XXI No.3
- Prasetiantono, A. Tony. 1995. *Agenda Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Samuelson dan Nordhaus. 1985. *Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Siswanti, Rina. 1999. *Pengaruh Defisit Anggaran Domestik Pemerintah dan Tingkat Harga Internasional Terhadap Tingkat inflasi di Indonesia Tahun 1983-1997*, Skripsi tidak dipublikasikan. Jember: FE-UNEJ.
- Suparmoko, M.A. 1992. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE-UGM
- Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*. Bandung: Penerbit Tarsito
- Tambunan, Tulus. 1998. *Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi*. LPFE-UI: Jakarta

- Taufiq, Muhammad. 1997. *Inflasi dan Dampaknya Terhadap Kegiatan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi, No.5, Th.4, Hal 43-51.
- Uphadi, AD. 1997. *Ancaman Inflasi Saat Krisis Rupiah*, dalam Media Indonesia, Th.XXVIII, 2 September.
- Widodo, HG Suseno. 1990. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wijaya, Faried dan Susatwo Hadiwigeno. 1982. *Untaian Bacaan Terpilih Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Yogyakarta: BPFE-UGM.





Perhitungan Defisit Anggaran Domestik

Guna mendapatkan besarnya defisit anggaran domestik dalam tahun kalender dari data APBN, perlu dilakukan beberapa tahap pengolahan, yaitu:

- i. Data tahunan APBN dalam tahun anggaran perlu diubah dulu menjadi data triwulan dengan metode interpolasi, yaitu sebagai berikut:

$$I = 1/4 \{Y_t - 4,5/12(Y_t - Y_{t-1})\}$$

$$II = 1/4 \{Y_t - 1,5/12(Y_t - Y_{t-1})\}$$

$$III = 1/4 \{Y_t + 1,5/12(Y_t - Y_{t-1})\}$$

$$IV = 1/4 \{Y_t + 4,5/12(Y_t - Y_{t-1})\}$$

dimana: Y_t = nilai tahun sekarang

Y_{t-1} = nilai tahun sebelumnya

2. Data triwulan APBN dalam tahun anggaran diubah menjadi data triwulan tahun kalender, dimana triwulan terakhir dalam tahun anggaran merupakan triwulan pertama dalam tahun kalender, kemudian dijumlahkan setiap triwulannya

Perkembangan Defisit Anggaran Domestik Tahun 1986 - 2000 (Dalam Milyar Rupiah).

Tahun	Penerimaan domestik	Pengeluaran Total	Defisit Anggaran Domestik	Laju DAD
1986	19 176	21 603	2 427	64,21
1987	19 076	23 193	4 117	69,63
1988	19 903	25 482	5 290	28,49
1989	23 242	31 543	8 301	56,92
1990	28 880	38 078	9 198	10,80
1991	39 277	45 324	6 047	34,26
1992	43 450	51 204	7 754	28,23
1993	46 740	58 079	11 339	46,23
1994	54 209	66 681	12 472	9,99
1995	63 555	73 452	9 897	-20,64
1996	71 712	78 250	6 538	-33,94
1997	83 224	92 296	9 072	38,78
1998	105 173	119 651	14 478	59,589
1999	146 082	188 228	42 146	191,13
2000	190 715	243 228	52 513	24,59

Sumber: Nota keuangan dan APBN, BPS 1999, Data diolah

Laju Inflasi Tahunan di Indonesia Berdasarkan Perubahan Indeks Harga Konsumen 1986-2000

Tahun	IHK	Tingkat Inflasi
1986	264,74	8,83
1987	289,13	8,90
1988	329,09	5,47
1989	331,06	5,97
1990	354,19	9,53
1991	386,87	9,52
1992	414,99	4,94
1993	456,15	9,77
1994	497,01	9,24
1995	421,93	8,64
1996	586,94	6,47
1997	629,80	11,05
1998	516,42	77,63
1999	243,12	2,01
2000	265,85	9,35

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS 1999

Lampiran 3

Hasil Uji Kausalitas Granger : DAD atas 4 lag INF dan 4 lag DAD tahun sebelumnya di Indonesia Tahun 1986 – 2000

LS // Dependent Variable is DAD
 Date: 10-04-2001 / Time: 0:01
 SMPL range: 1990 - 2000
 Number of observations: 11

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
DAD(-1)	0.3073358	0.2544924	1.2076422	0.3137
DAD(-2)	-1.1802713	0.3634600	-3.2473209	0.0476
DAD(-3)	0.0770003	0.3368328	0.2286011	0.8339
DAD(-4)	0.1446129	0.3193421	0.4528463	0.6814
INF(-1)	2.8164088	0.4480488	6.2859426	0.0081
INF(-2)	0.9057048	0.9186933	0.9858620	0.3969
INF(-3)	-5.5300168	4.3439932	-1.2730261	0.2927
INF(-4)	3.5084936	3.6873438	0.9514962	0.4115
R-squared	0.953863	Mean of dependent var		29.13305
Adjusted R-squared	0.846210	S.D. of dependent var		62.24567
S.E. of regression	24.41028	Sum of squared resid		1787.585
Log likelihood	-43.60731	F-statistic		8.860556
Durbin-Watson stat	2.911065	Prob(F-statistic)		0.050202

Lampiran 4

Hasil Uji Kausalitas Granger : DAD atas 2 lag INF dan 2 lag DAD tahun sebelumnya di
Indonesia Tahun 1986 – 2000

LS // Dependent Variable is DAD

Date: 10-04-2001 / Time: 0:09

SMPL range: 1988 - 2000

Number of observations: 13

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
DAD(-1)	0.3230630	0.2866942	1.1268558	0.2890
DAD(-2)	-0.4289776	0.2772086	-1.5474900	0.1562
INF(-1)	2.4237426	0.4439249	5.4598027	0.0004
INF(-2)	-0.1541058	0.7690389	-0.2003876	0.8456
R-squared	0.748496	Mean of dependent var		31.22104
Adjusted R-squared	0.664661	S.D. of dependent var		57.34478
S.E. of regression	33.20747	Sum of squared resid		9924.626
Log likelihood	-61.59206	F-statistic		8.928234
Durbin-Watson stat	1.899851	Prob(F-statistic)		0.004625

Lampiran 5

Hasil Uji Kausalitas Granger : INF atas 4 lag DAD dan 4 lag INF tahun sebelumnya di Indonesia
Tahun 1986 – 2000

LS // Dependent Variable is INF
Date: 10-04-2001 / Time: 0:14
SMPL range: 1990 - 2000
Number of observations: 11

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
INF(-1)	-0.1833936	0.4682639	-0.3916458	0.7215
INF(-2)	-0.1924194	0.9601430	-0.2004071	0.8540
INF(-3)	-1.7905008	4.5399859	-0.3943847	0.7197
INF(-4)	4.8386405	3.8537097	1.2555799	0.2982
DAD(-1)	0.1933124	0.2659746	0.7268076	0.5199
DAD(-2)	-0.5313527	0.3798586	-1.3988170	0.2563
DAD(-3)	0.0706509	0.3520301	0.2006956	0.8538
DAD(-4)	-0.1349588	0.3337502	-0.4043705	0.7130
R-squared	0.563135	Mean of dependent var		14.37727
Adjusted R-squared	0.456216	S.D. of dependent var		21.14098
S.E. of regression	25.51162	Sum of squared resid		1952.528
Log likelihood	-44.09274	F-statistic		0.552445
Durbin-Watson stat	2.802127	Prob(F-statistic)		0.766965



Lampiran 6

Hasil Uji Kausalitas Granger : INF atas 2 lag DAD dan 2 lag INF tahun sebelumnya di Indonesia
Tahun 1986 – 2000

LS // Dependent Variable is INF
Date: 10-04-2001 / Time: 0:15
SMPL range: 1988 - 2000
Number of observations: 13

VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
INF(-1)	0.2414560	0.3257002	0.7413445	0.4774
INF(-2)	0.0793140	0.5642308	0.1405702	0.8913
DAD(-1)	0.1405198	0.2103427	0.6680520	0.5209
DAD(-2)	-0.2103272	0.2033833	-1.0341422	0.3281
R-squared	0.035824	Mean of dependent var		13.04538
Adjusted R-squared	0.285568	S.D. of dependent var		19.57118
S.E. of regression	22.19037	Sum of squared resid		4431.712
Log likelihood	-56.35155	F-statistic		0.111465
Durbin-Watson stat	2.334206	Prob(F-statistic)		0.951212